



Laporan

# Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango

Tahun 2021



Cibodas  
2021

## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama Kegiatan : Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango  
Tahun 2021

Sumber Dana : -

Cibodas, November 2021

Disusun oleh:

Plh. Kepala Sub Bagian  
Data, Evlap, dan Kehumasan,

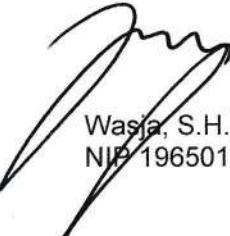
Aganto Seno, S.Si, M.Sc.  
NIP. 19760427 200112 1 002

Mengetahui:  
Plt. Kepala Balai Besar,



Wasja, S.H.  
NIP. 19650106 199803 1 004

Disahkan oleh:  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Wasja, S.H.  
NIP 19650106 199803 1 004

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenanNyalah Laporan Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 ini dapat disusun dengan lancar. Laporan ini berisi hasil penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dengan menggunakan Management Effectiveness Tracking Toll (METT). Terdapat empat bagian dalam penilaian ini, yaitu lembar data kemajuan kawasan konservasi, lembar ancaman terhadap nilai-nilai penting kawasan konservasi, lembar penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dan lembar rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Penilaian ini idelanya dilakukan secara periodik setiap dua tahun, namun penilaian terakhir untuk TNGGP dilaksanakan pada tahun 2017 lalu. Laporan ini akan mengupas perkembangan penilaian pada tahun 2017 tersebut yang dibandingkan dengan penilaian pada tahun 2021 ini.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak terutama dari internal Balai Besar TNGGP sejumlah 36 orang dan para pihak ekternal Balai Besar TNGGP sejumlah 33 orang yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti dan melaksanakan Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 ini. Kami juga menerima saran, kritik dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan dan evaluasinya. Akhir kata, semoga laporan dan data Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Cibodas, November 2021  
Penyusun,

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
BAB II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN .....	2
A. Dasar Pelaksanaan .....	2
B. Pelaksanaan Kegiatan .....	2
1. Alat dan Bahan .....	2
2. Waktu .....	2
3. Lokasi .....	3
4. Pelaksana .....	3
5. Metode .....	3
C. Indikator Kegiatan .....	4
BAB III. HASIL KEGIATAN .....	5
A. Peserta Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP .....	5
B. Lembar Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP .....	6
1. Lembar Data Kemajuan Kawasan Konservasi .....	6
2. Lembar Data Ancana terhadap Kawasan Konservasi .....	6
3. Lembar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi .....	8
4. Lembar Rekomendasi .....	12
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	13
A. Kesimpulan .....	13
B. Saran .....	13
Lampiran	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi peserta Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP tahun 2021 .....	5
Gambar 2. Jumlah ancaman terhadap nilai penting TNGGP .....	7
Gambar 3. Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP tahun 2017 dan 2021 .....	8

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Lembar Data Kemajuan Kawasan Konservasi (TNGGP)
- Lampiran 2. Lembar Data Ancaman terhadap Kawasan Konservasi (TNGGP)
- Lampiran 3. Lembar Data Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP
- Lampiran 4. Lembar Rekomendasi (Resume Hasil Penilaian METT)
- Lampiran 5. Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Konservasi TNGGP tahun 2022-2023
- Lampiran 6. Notulensi Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP tanggal 12 November 2021
- Lampiran 7. Daftar Hadir faktual peserta Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP tahun 2021
- Lampiran 8. Daftar Hadir virtual peserta Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP tahun 2021
- Lampiran 9. Surat Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: UN.1630/BBTNGGP/TU.3/11/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2021
- Lampiran 10. Surat Tugas dari Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi Nomor: ST.333/KK/PPKK1/KSA.1/11/2021 tanggal 5 November 2021 a.n. Dian Risdianto, S.P., M.Si dan Ridwan
- Lampiran 11. Surat Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: UN.1543/BBTNGGP/TU.3/10/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Persiapan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2021
- Lampiran 12. Daftar Hadir Penilaian Pendahuluan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2021
- Lampiran 13. Dokumentasi Persiapan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2021
- Lampiran 14. Keputusan Kepala Balai Besar Nomor: SK.498/BBTNGGP/TU.3/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Balai Besar TNGGP Tahun 2021
- Lampiran 15. Surat Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: UN.1689/BBTNGGP/TU.3/11/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
- Lampiran 16. Contoh Sertifikat yang diberikan bagi seluruh peserta dan fasilitator.

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sebagai pengelola salah satu dari lima taman nasional pertama di Indonesia yang ditunjuk pada tahun 1980, terus berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaannya. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perlu dilakukan secara periodik, misalnya setiap dua tahun seperti yang dilakukan di Indonesia. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tersebut dilakukan untuk menkaji seberapa baik pengelolaannya atau tingkatan pengelolaan yang telah dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai penting kawasan konservasi dan tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan. Penilaian ini bukan untuk menilai pengelolanya.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (KK) dapat memberikan manfaat, diantaranya memberikan panduan penggunaan sumberdaya secara efektif, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan kesadaran atas nilai kawasan konservasi, menjadi alat bantu evaluasi dan perencanaan, serta komitmen internasional. Penilaian efektivitas pengelolaan KK dapat dilakukan melalui berbagai cara atau *tools*. Salah satunya menggunakan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT), yang digunakan di Indonesia. Penilaian menggunakan METT ini telah dilakukan sejak tahun 2015, termasuk untuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Penilaian efektivitas pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango pertama kali dilakukan pada tahun 2015 dengan nilai yang diperoleh sebesar 80,00%. Penilaian kedua pada tahun 2017, dengan nilai 80,81%. Penilaian berikutnya seharusnya dilakukan pada tahun 2019, namun belum dilakukan sehingga perlu segera dilakukan penilaian kembali.

### B. Tujuan

Tujuan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 yaitu:

1. Mengetahui nilai efektivitas pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango pada periode Tahun 2020-2021.
2. Memberikan rekomendasi dan Rencana Aksi untuk peningkatan efektivitas pengelolaan melalui Rencana Aksi.

## **BAB II. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor I Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
4. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
5. Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: SK.498/BBTNGGP/TU.3/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pembentukan Tim Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Balai Besar TNGGP Tahun 2021;
6. Surat Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: UN.1630/BBTNGGP/TU.3/11/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2021.

### **B. Pelaksanaan Kegiatan**

#### **1. Alat dan Bahan**

Alat dan bahan yang digunakan pada Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021, yaitu:

- a. Formulir penilaian, terdiri dari Lembar Penilaian, Ancaman, dan Rekomendasi;
- b. Dokumen terkait sebagai bukti penilaian;
- c. Alat Tulis Kantor (ATK);
- d. Aplikasi Zoom bagi peserta secara daring.

#### **2. Waktu**

Waktu pelaksanaan Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 selama satu hari, pada hari Jumat, 12 November 2021, secara faktual dan virtual.

### **3. Lokasi**

Pelaksanaan kegiatan Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 secara faktual di ruang rapat Mandalawangi, kantor Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango dan secara daring menggunakan aplikasi Zoom.

### **4. Pelaksana**

Pelaksana kegiatan Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 yaitu 36 orang internal Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan 33 orang dari eksternal, sesuai daftar hadir.

### **5. Metode**

#### **1. Persiapan**

- a) Membuat grup WhatsApp “Tim METT 2021” pada tanggal 30 Agustus 2021 yang terdiri dari anggota tim sesuai Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP.
- b) Mengumpulkan bahan berupa bukti-bukti yang diperlukan. Bukti-bukti tersebut dapat diunggah oleh masing-masing penanggung jawab bukti melalui Google form dengan link <https://bit.ly/bbtnggpmeet> yang dibuat pada tanggal 13 Oktober 2021.
- c) Melakukan penilaian pendahuluan yang dilakukan secara internal lingkup Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango pada tanggal 19 Oktober 2021 secara faktual dan virtual. Penilaian pendahuluan yang juga melibatkan Bidang PTN Wilayah ini dilakukan dengan merujuk pada nilai pada tahun 2017 dan diperbaharui sesuai bukti-bukti terkini.

#### **2. Pelaksanaan**

- a) Melakukan Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 bersama para pihak terkait secara faktual dan virtual pada tanggal 12 November 2021.
- b) Menyusun Rencana Aksi sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan pada waktu Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021.

### 3. Evaluasi dan Pelaporan

- a) Melaporkan hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 kepada Direktur Jenderal KSDAE sesuai Surat Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: S.1689/BBTNGGP/TU.3/11/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021.
- b) Membuat laporan lengkap Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 dan mengunggahnya pada *Gepang e-Library*.

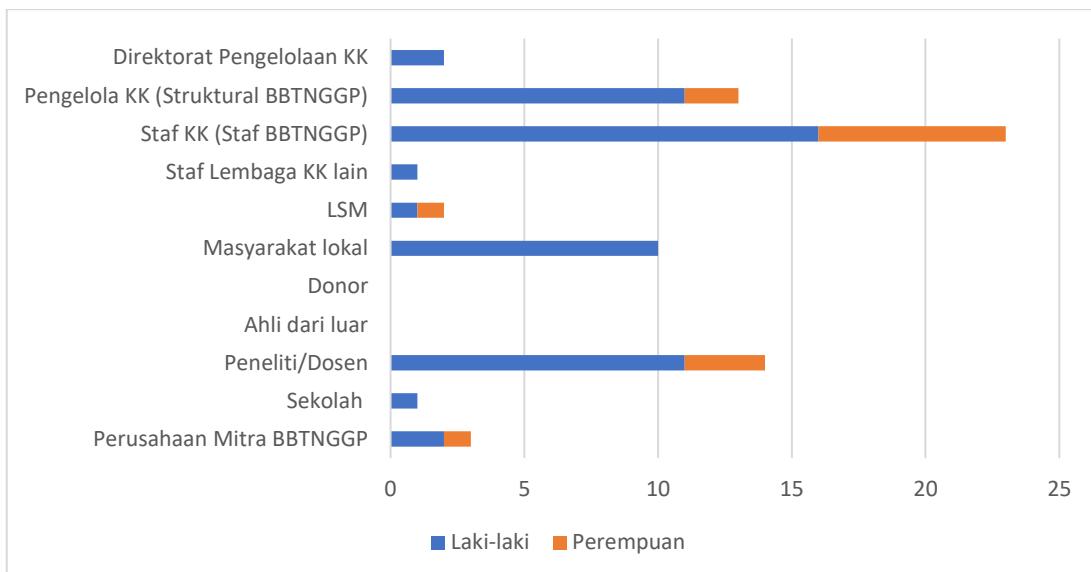
### C. Indikator Kegiatan

Tersedianya satu dokumen laporan Penilaian Efektivitas Pengelolaan TN Gunung Gede Pangrango Tahun 2021.

### BAB III. HASIL KEGIATAN

#### A. Peserta Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP

Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP pada Tahun 2021 ini dihadiri oleh 69 orang, yang terdiri dari 55 laki-laki dan 14 perempuan. Peserta tersebut berasal dari internal Balai Besar TNGGP sebanyak 36 orang dan para pihak lainnya sebanyak 33 orang. Berikut disampaikan komposisi peserta tersebut, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Komposisi peserta Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP tahun 2021

Gambar 1. di atas memperlihatkan komposisi peserta yang cukup bervariasi dari berbagai *stakeholders* (para pihak). Peserta dari internal Balai Besar TNGGP juga terdiri dari pejabat struktural, fungsional umum, fungsional tertentu, dan PPNPN. Peserta dari masyarakat local sebagian besar berasal dari *volunteer* yang telah lama bekerja bersama Balai Besar TNGGP. Sedangkan peserta dari LSM, peneliti atau dosen, sekolah, dan perusahaan merupakan *stakeholders* yang juga pernah melakukan kerja sama, izin, ataupun kegiatan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Terdapat sedikit perbedaan jumlah peserta yang dilaporkan kepada Direktur Jenderal KSDAE sesuai Surat Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: S.1689/BBTNGGP/TU.3/11/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021, dengan data yang disampaikan pada laporan ini. Hal ini karena terdapat lima orang peserta faktual mengisi daftar hadir faktual maupun virtual. Selain itu, terdapat empat orang peserta virtual yang mengisi daftar hadir sebanyak dua kali. Sehingga data pada surat tersebut dikoreksi pada laporan ini.

Apabila dibandingkan dengan Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP sebelumnya pada tahun 2017, yang pada waktu itu dihadiri oleh sekitar 40 orang dengan sebagian peserta dari internal Balai Besar TNGGP. Peserta dari eksternal hanya dari peneliti yang sedang melakukan penelitian di TNGGP. Jumlah dan komposisi peserta Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP tahun 2021 ini mengalami peningkatan menjadi 69 orang, dengan hampir setengahnya berasal dari eksternal. Harapannya, hasil penilaian pada tahun ini menjadi lebih baik dan lebih diakui oleh para pihak. Daftar hadir secara faktual dan virtual terlampir pada Lampiran 6. dan Lampiran 7.

## **B. Lembar Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP**

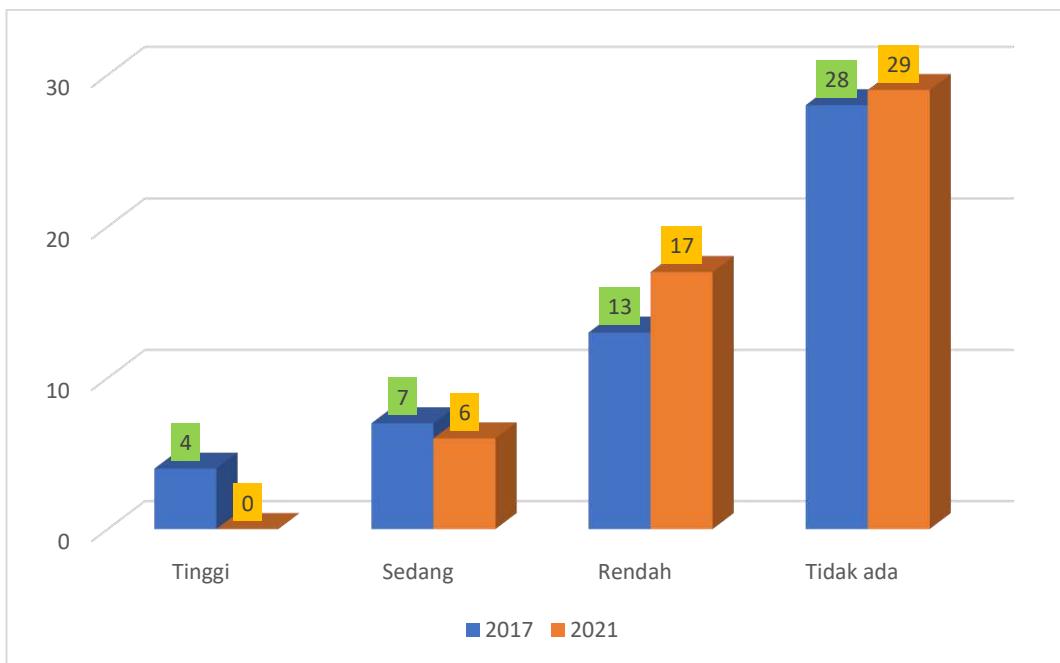
Terdapat empat bagian utama pada Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, yaitu Lembar Data Kemajuan Kawasan Konservasi, Lembar Ancaman terhadap Kawasan Konservasi, Lembar Penilaian, dan Lembar Rekomendasi. Berikut disampaikan hasil penilaian melalui masing-masing Lembar Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP.

### **1. Lembar Data Kemajuan Kawasan Konservasi**

Pada lembar data ini, disampaikan detail kontak penanggung jawab penyelesaian METT, tanggal penilaian, dan data kemajuan pengelolaan TNGGP, termasuk di dalamnya nilai utama TNGGP, anggaran rutin, sampai tujuan pengelolaan TNGGP. Data ini relatif sama dengan penilaian sebelumnya, yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

### **2. Lembar Data Ancaman terhadap Kawasan Konservasi**

Terdapat 52 ancaman yang teridentifikasi dapat terjadi pada kawasan konservasi, yang dikelompokkan ke dalam 12 jenis ancaman. Dua belas jenis ancaman tersebut yaitu pembangunan pemukiman dan komersial didalam kawasan konservasi, budidaya pertanian dan perikanan di dalam kawasan konservasi, produksi energi dan pertambangan di dalam kawasan konservasi, koridor transportasi dan jasa dalam kawasan konservasi, penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis di dalam kawasan konservasi, campur tangan atau gangguan manusia di dalam kawasan konservasi, modifikasi sistem alam, polusi yang masuk atau muncul di dalam kawasan konservasi, peristiwa geologis, perubahan iklim dan cuaca buruk, serta ancaman budaya dan sosial spesifik. Berikut disampaikan jumlah ancaman di TNGGP berdasarkan tingkat ancaman tersebut terdapat nilai penting TNGGP pada tahun 2017 dan 2021.



Gambar 2. Jumlah ancaman terhadap nilai penting TNGGP

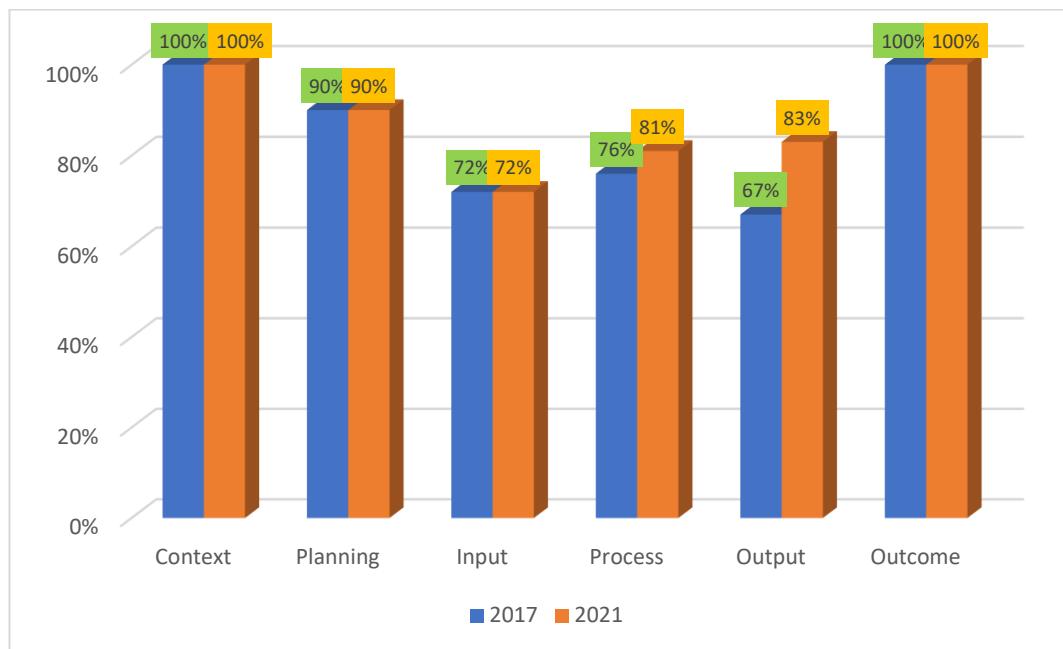
Gambar 2. di atas memperlihatkan bahwa secara umum terjadi penurunan ancaman terhadap nilai-nilai penting Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dari Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2021 ini. Pada tahun 2021 ini, sudah tidak terdapat ancaman tinggi terhadap nilai-nilai penting TNGGP. Menurunnya tingkat ancaman ini mengindikasikan pengelolaan TNGGP yang sudah lebih baik.

Ancaman dengan kriteria sedang yang masih terjadi di TNGGP pada tahun 2021 ini yaitu kegiatan rekreasi dan wisata berupa sampah; “efek tepi” sebagai dampak desain kawasan yang menjari; tanaman invasif non-native atau asing; sampah dan sampah padat; tanah longsor; serta hilangnya kaitan budaya, pengetahuan lokal dan/atau praktik pengelolaan. Ancaman-ancaman ini perlu ditindaklanjuti agar dapat menurunkan tingkat ancamannya, tanpa mengabaikan ancaman dengan kategori rendah yang juga masih terjadi di TNGGP.

Ancaman dengan kategori rendah yang masih terjadi di TNGGP pada tahun 2021 ini yaitu adanya infrastruktur wisata dan rekreasi; budidaya non kayu tahunan atau sepanjang tahun; jalan; jalur layanan dan jasa; pemburuan, pembunuhan, dan pengumpulan satwa darat; pengumpulan tanaman darat atau produk tanaman (bukan kayu); pembalakan dan pemanenan kayu; pemancingan, pembunuhan dan pemanenan sumberdaya air; vandalisme; bendungan, modifikasi hidrologis dan pengelolaan/pemanfaatan air; satwa invasif non-native/asing; saluran pembuatan atau air limbah dari fasilitas kawasan konservasi; pembuangan dari pertanian dan kehutanan; gunung berapi; erosi; suhu ekstrim; dan badai.

### 3. Lembar Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Lembar data penilaian ini berisi 30 pertanyaan indikator pengelolaan, yang dapat dikelompokkan menjadi enam elemen penilaian, yaitu *context*, *planning*, *input*, *process*, *output*, dan *outcome*. Nilai yang diberikan berkisar antara 0 (buruk) sampai 3 (sangat baik). Berikut disampaikan hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP tahun 2017 dan 2021 pada keenam elemen penilaian.



Gambar 3. Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP tahun 2017 dan 2021

Gambar 3. di atas memperlihatkan adanya peningkatan nilai pada elemen *process* dan *output* antara penilaian pada tahun 2017 dengan tahun 2021 ini. Elemen *context* berisi satu pertanyaan terkait status hukum kawasan konservasi. Seluruh kawasan konservasi di Indonesia telah memiliki status hukum yang jelas, berupa SK Penunjukkan ataupun SK Penetapan. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango Seluas  $\pm$  21.975 ha (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa Barat Menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kawasan ini juga telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango seluas 24.270,80 (Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh dan Delapan Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Elemen *planning* terdiri dari lima pertanyaan, terkait peraturan kawasan konservasi (KK), tujuan utama KK, *design* KK, rencana pengelolaan jangka panjang KK, serta rencana penggunaan lahan dan air. Pada elemen *planning* ini, terdapat satu pertanyaan yang tidak memperoleh nilai maksimal (3), namun mendapatkan nilai 2, yaitu Desain Kawasan Konservasi. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango memiliki desain yang menjari dan tidak kompak, dengan sebagian kawasan berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat sehingga terdapat dapat menimbulkan fragmentasi habitat satwa liar.

Elemen *input* terdiri dari enam pertanyaan, terkait penegakan peraturan, inventarisasi sumberdaya, jumlah pegawai, anggaran saat ini, kepastian anggaran, dan perlengkapan. Hasil penilaian pada elemen ini pada tahun 2021 ini masih sama dengan penilaian pada tahun 2017 lalu. Aspek yang masih mendapatkan nilai 2, yaitu inventarisasi sumberdaya yang telah dilakukan pada fitur-fitur utama, namun sampai saat ini belum memiliki sistem informasi manajemen (SIM). Aplikasi yang sedang dikembangkan adalah aplikasi Data Gepang, yang berisi data-data yang harus diinput pada Aplikasi SIDAK KSDAE. Pembuatan aplikasi Data Gepang ini dilakukan untuk memudahkan pengisian bagi personil Resort PTN Wilayah. Saat ini, data masih dihimpun menggunakan *Google Spreadsheet*. Aspek lain yang juga masih mendapatkan nilai 2 yaitu jumlah pegawai, anggaran saat ini, kepastian anggaran, dan perlengkapan. Keempat aspek tersebut sudah dimiliki Balai Besar TNGGP, namun masih dirasa kurang. Misalnya jumlah pegawai yang pensiun atau pindah, tidak digantikan dengan penerimaan pegawai baru atau pindahan. Kondisi anggaran pada tahun 2020 dan 2021 ini dapat dikatakan tidak pasti, karena adanya beberapa kali penghematan anggaran untuk mengatasi Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 ini telah dihapuskan sebanyak 1.528 unit peralatan dan mesin sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.5134/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penghapusan BMN pada Direktorat Jenderal KSDAE yang Berada pada Balai Besar TNGGP. Selain itu, juga telah dihapuskan sebanyak 84 unit gedung bangunan sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6503/MENLHK-SETJEN/ROUM/KAP.3/10/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penghapusan BMN pada Direktorat Jenderal KSDAE yang Berada pada Balai Besar TNGGP. Barang-barang milik negara tersebut belum digantikan dengan BMN yang baru.

Elemen *process* terdiri dari 14 pertanyaan, terkait pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi, sistem perlindungan, riset, pengelolaan sumberdaya, pelatihan pegawai, pengelolaan anggaran, pemeliharaan perlengkapan,

pendidikan dan penyadaran, Pemerintah Daerah dan swasta sekitar kawasan, masyarakat adat dan masyarakat asli/tradisional, masyarakat lokal, monitoring dan evaluasi, operator wisata komersil, dan pungutan PNBP. Beberapa aspek yang masih mendapatkan nilai 2, yaitu pengukuhan (demarkasi) batas kawasan. Masih terdapat sedikit tumpeng tindih batas kawasan dengan tanah milik masyarakat. Masih perlu ditingkatkan koordinasi dengan BPKH Yogyakarta dan juga *update* data di lapangan. Pelatihan bagi pegawai BBTNGGP juga masih perlu ditingkatkan frekuensi maupun jenis pelatihannya. Salah satu yang sudah dilakukan berupa penyelenggaraan *in house training* internal Balai Besar TNGGP pada tahun 2021 ini. Pengelolaan anggaran juga masih perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan tujuan utama penetapan kawasan beserta nilai-nilai pentingnya. Salah satu yang terlewat misalnya satwa Surili disebutkan dalam SK Penunjukkan, namun selama beberapa tahun terakhir belum dilakukan inventarisasi maupun monitoring Surili ini. Pemeliharaan perlengkapan juga belum didukung dengan anggaran yang memadai. Pagu anggaran tahun 2022 untuk Pemeliharaan (002) masih sama dengan pagu anggaran pada tahun 2021. Sementara Balai Besar TNGGP telah memiliki Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa di Cimungkad yang dibangun menggunakan sumber dana SBSN sebesar lebih dari Rp 5 miliar pada tahun 2020. Pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat sekitar masih perlu ditingkatkan. Salah satu contoh, kegiatan *school visit* maupun *visit to school* pada tahun 2021 ini telah direfocusing, sehingga kegiatan tersebut harus ditunda.

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango hanya memiliki masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan, tanpa ada masyarakat adat/asli/tradisional yang berada di dalam kawasan. Oleh karena itu, nilai untuk masyarakat adat/asli/tradisional dikosongkan. Aspek pada elemen *process* yang juga masih perlu ditingkatkan yaitu monitoring dan evaluasi. Beberapa kegiatan movev yang telah dilakukan misalnya METT pada tahun 2017, Laporan Kinerja dan Statistik tahun 2020, serta Evaluasi dan Penilaian Pegawai BBTNGGP tahun 2021. Namun implementasi SMART Patrol maupun SMART RBM sampai saat ini belum dilakukan di TNGGP. Aspek operator wisata komersil di TNGGP masih sebatas terbitnya IUPJWA dan IUPSWA. Pungutan berupa PNBP maupun pungutan lain di TNGGP belum dapat memberikan kontribusi yang substansial bagi kawasan dan masyarakat sekitar, sehingga nilainya masih 2. Belum ada kawasan konservasi di Indonesia yang memperoleh nilai 3, karena belum ada mekanisme yang mengatur penggunaan PNBP tersebut.

Terdapat dua elemen *process* yang mengalami peningkatan nilai dari 2 menjadi 3 pada penilaian tahun 2017 ke tahun 2021 ini, yaitu pengelolaan sumberdaya dan riset. Selain kegiatan inventarisasi dan monitoring tiga satwa prioritas (Mancan Tutul Jawa, Elang Jawa, dan Owa Jawa), telah dilakukan pemulihan ekosistem yang mengacu pada Rencana Pemulihan Ekosistem tahun 2020-2024. Peningkatan riset terlihat pada adanya identifikasi bioprospecting pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, hasil-hasil penelitian terutama oleh mahasiswa termasuk hasil praktik kerja lapangan sudah diunggah melalui Gepang e-Library yang dapat diakses pada link <https://elibrary.gedepangrango.org/catalog.php>

Elemen *output* terdiri dari dua pertanyaan, terkait Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Rencana Kerja) dan fasilitas pengunjung. Balai Besar TNGGP telah memiliki Rencana Kerja tahun 2020, 2021, dan 2022. Rencana Kerja tersebut belum dimiliki Balai Besar TNGGP pada penilaian tahun 2017, sehingga meningkatkan nilai dari 2 menjadi 3. Fasilitas pengunjung masih dinilai sama antara tahun 2017 dengan tahun 2021 ini. Meskipun telah banyak fasilitas pengunjung yang tersedia pada tahun 2020-2021 ini, namun masih banyak pula lokasi wisata dengan fasilitas pengunjung yang terbatas. Oleh karenanya, fasilitas pengunjung tersebut masih perlu ditingkatkan.

Elemen *outcome* juga terdiri dari dua pertanyaan, yaitu keuntungan ekonomis yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar dan kondisi nilai-nilai yang masih dapat dipertahankan. Salah satu keuntungan ekonomis yang dirasakan masyarakat khususnya pada sektor pariwisata berdasarkan hasil Survei Dampak Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pada Oktober 2021 yaitu sebanyak 236 responden dari 269 responden (87,7%) mengaku pekerjaan atau kegiatan wisata yang dilakukan di TNGGP dan sekitarnya merupakan pekerjaan utama mereka. Nilai kemanfaatan yang diperoleh masyarakat sekitar kawasan tersebut pada sektor pariwisata berupa pendapatan kotor (omset) sekitar Rp.173 ribu per orang per hari untuk semua jenis kegiatan wisata dan pada semua lokasi wisata. Sedangkan pendapatan bersih (laba bersih) sekitar Rp.134 ribu per orang per hari. Laporan lengkap hasil survei ini dapat diakses pada link <https://elibrary.gedepangrango.org/single-product.php?id=219>

Secara keseluruhan, terdapat tiga aspek penilaian yang meningkat dari penilaian tahun 2017 ke penilaian tahun 2021 ini, yaitu pengelolaan sumberdaya dan riset pada elemen *process*, serta Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN) atau Rencana Kerja pada elemen *output*.

Berdasarkan Penilaian Efektivitas Pengelolaan TNGGP yang telah dilaksanakan tersebut, diperoleh Nilai Efektivitas Pengelolaan TNGGP sebesar 83,84%. Nilai ini meningkat dari penilaian sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 80,81%. Hasil penilaian ini masih perlu diverifikasi oleh Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang kemudian akan ditetapkan nilainya. Nilai tersebut juga akan dikonversikan menjadi Indeks Efektivitas Pengelolaan TNGGP.

#### **4. Lembar Rekomendasi**

Lembar rekomendasi berisi kekuatan, kelemahan, isu prioritas, dan rekomendasi untuk masing-masing elemen yang dinilai. Rekomendasi ini menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Lembar Rekomendasi ini disampaikan dalam Resume Hasil Penilaian METT sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 4. Sedangkan Rencana Aksi merupakan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat (tahun 2022-2023) sebagai pemenuhan rekomendasi langkah ke depan. Rencana Aksi difokuskan pada aspek yang memiliki nilai 2 (tidak terdapat aspek dengan nilai kurang dari 2), diantaranya yang dapat dilakukan dalam waktu dekat sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Mandat Kawasan, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNGGP Periode 2019 - 2028, Renstra TNGGP periode tahun 2020 - 2024, dan Renja BBTNGGP;  
Salah satu mandat kawasan yang belum dilaksanakan secara serius yaitu inventarisasi dan monitoring Surili sebagai salah satu satwa identitas TNGGP. Selama ini inventarisasi dan monitoring difokuskan pada tiga satwa prioritas yaitu Macan Tutul Jawa, Elang Jawa, dan Owa Jawa.
- b. Monitoring secara *time series* dan menambah inventarisasi jenis lainnya terutama flora serta menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan inventarisasi TSL;
- c. Usulan kebutuhan pegawai sesuai sesuai dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK);
- d. Mendorong komitmen mengaplikasikan hasil monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan;
- e. Pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap pemegang izin;
- f. Monitoring pelaksanaan RKT pemegang izin dan pemegang PKS.

Rencana Aksi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

## BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dilakukan oleh 69 orang, terdiri dari 36 orang internal Balai Besar TNGGP dan 33 orang dari para pihak eksternal.
2. Terdapat 4 (empat) ancaman terhadap nilai-nilai penting kawasan dengan kategori tinggi pada penilaian tahun 2017. Ancaman tersebut telah turun menjadi kategori sedang atau rendah pada penilaian tahun 2021 ini.
3. Terdapat tiga aspek penilaian yang meningkat dari penilaian tahun 2017 ke penilaian tahun 2021 ini, yaitu pengelolaan sumberdaya dan riset pada elemen *process*, serta Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN) atau Rencana Kerja pada elemen *output*.
4. Nilai Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango meningkat dari penilaian tahun 2017 sebesar 80,81% menjadi 83,84% pada penilaian tahun 2021 ini. Nilai ini masih perlu diverifikasi oleh Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang kemudian akan ditetapkan nilainya. Nilai tersebut juga akan dikonversikan menjadi Indeks Efektivitas Pengelolaan TNGGP.
5. Salah satu mandat kawasan yang belum dilaksanakan secara serius yaitu inventarisasi dan monitoring Surili sebagai salah satu satwa identitas TNGGP. Selama ini inventarisasi dan monitoring difokuskan pada tiga satwa prioritas yaitu Macan Tutul Jawa, Elang Jawa, dan Owa Jawa.
6. Terdapat 19 (sembilan belas) kegiatan Rencana Aksi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai pada 16 (enam belas) aspek penilaian.

### B. Saran

1. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango perlu dilaksanakan secara periodik setiap dua tahun. Penilaian selanjutnya agar dilaksanakan pada tahun 2023.
2. Rekomendasi kegiatan yang juga telah dituangkan dalam Rencana Aksi agar dilaksanakan untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
3. Pada pelaksanaan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2021 ini telah diselingi dengan kuis (3 sesi) yang berhadiah tumbler, flashdisk, dan tas belanja dari Balai Besar TNGGP. Selain itu, setiap peserta dan fasilitator juga diberikan Sertifikat. Inovasi ini agar dilanjutkan pada penilaian berikutnya.

# Lampiran

## Pelaporan Kemajuan Situs kawasan konservasi: Lembar Data 1

Nama, Afiliasi dan detil kontak penanggung jawab penyelesaian METT (email, etc)		1. Wasja, S.H. (aja.ahyati@gmail.com) 2. Buana Darmansyah, S.Hut.T. (bwana.dh@gmail.com) 3. Aganto Seno, S.Si, M.Sc. (agantoseno@gmail.com)		
Tanggal pelaksanaan penilaian		12 November 2021		
Nama Kawasan Konservasi		Taman Nasional Gunung Gede Pangrango		
Kode situs WDPA (dapat ditemukan di <a href="http://www.unep-wcmc.org/wdpa">www.unep-wcmc.org/wdpa</a> ):		2350		
Penetapan	Nasional: Taman Nasional	Kategori IUCN: II	Internasional (silakan lengkapi pula lembar):	Cagar Biosfer
Negara	Indonesia			
Lokasi kawasan konservasi (provinsi dan jika dimungkinkan juga peta acuan)		Kabupaten Cianjur-Sukabumi-Bogor; Provinsi Jawa Barat		
Tanggal penetapan		SK.3683/Menhet-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014		
Detil Kepemilikan (Silakan di contreng)		Negara ✓	Swasta	Masyarakat
Otoritas Manajemen		Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango		
Luas kawasan konservasi (Ha)		24.270, 80 Ha		
Jumlah Staf	Permanen: 106 orang		Temporer : 54 orang	
Anggaran Tahunan (US\$) – tanpa anggaran gaji staf		Dana (operasional) rutin Dana (operasional) rutin Rp. 8.309.359.000,- (DIPA Tahun 2021)	APBD -	Dana proyek atau tambahan lain -
Apakah nilai utama penetapan kawasan konservasi		Sebagai Perwakilan Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermanfaat untuk Mendukung Habitat Owa Jawa, Macan Tutul, Surili, dan burung dilindungi		
Tuliskan dua tujuan primer pengelolaan kawasan konservasi				
Tujuan Pengelolaan 1	Memulihkan ekosistem yang rusak pada kawasan perluasan TNGGP dalam rangka mempertahankan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa sebagai sistem penyanga kehidupan			
Tujuan Pengelolaan 2	Melindungi dan mengamankan kawasan TNGGP			
Tujuan Pengelolaan 3	Terwujudnya sumberdaya manusia berwawasan lingkungan manusia berwawasan lingkungan			
Tujuan Pengelolaan 4	Terwujudnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan TNGGP			
Tujuan Pengelolaan 5	Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, Owa Jawa, Macan Tutul, Elang Jawa dan satwa liar lainnya			
Tujuan Pengelolaan 6	Membangun data dan informasi serta sistem monitoring keanekaragaman hayati			
Tujuan Pengelolaan 7	Mewujudkan aktifitas pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan			
Tujuan Pengelolaan 8	Mewujudkan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan nyaman			
Tujuan Pengelolaan 9	Meningkatkan pemanfaatan air			
Tujuan Pengelolaan 10	Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati TNGGP			

#### Lampiran 1. Lembar Data Kemajuan Kawasan Konservasi

**Ancaman kawasan konservasi: Lembar Data 2**

Silakan centang semua ancaman yang relevan yang ada dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat ancaman yang :

**tinggi** adalah ancaman-ancaman yang menyebabkan degradasi serius nilai - nilai utama kawasan, fragmentasi habitat; .

**sedang** adalah ancaman yang memiliki dampak negatif,

**rendah** adalah ancaman yang ada tetapi tidak memiliki dampak serius,

**N/A** adalah ancaman tidak ada atau tidak terdapat di kawasan konservasi tersebut

Jenis Ancaman	Ancaman	Tinggi	Sedang	Rendah	N/A	KETERANGAN
1. Pembangunan pemukiman dan komersial di dalam kawasan konservasi	1.1 Perumahan dan pemukiman				✓	
	1.2 Kawasan komersil dan industri				✓	
	1.3 Infrastruktur wisata dan rekreasi			✓		
2. Budidaya pertanian dan perikanan didalam kawasan konservasi	2.1 Budidaya non kayu Tahunan atau Sepanjang Tahun			✓		Terdapat pertanian lahan kering seluas 501,02 Ha, pertanian kering campur semak seluas 303,07 Ha, dan sawah/ persawahan 110,35 Ha (total 914 Ha / 3,77%)
	2.1a Perladangan obat terlarang ( <i>drugs</i> )				✓	
	2.2 Perkebunan kayu dan pulp				✓	
	2.3 Peternakan dan penggembalaan				✓	
	2.4 Akuakultur Laut dan Air Tawar				✓	
3. Produksi energy dan pertambangan di dalam kawasan konservasi	3.1 Pengeboran minyak dan gas				✓	
	3.2 Pertambangan dan penggalian				✓	
	3.3 Pembangkit energy, termasuk bendungan untuk PLTA dan Panas Bumi				✓	
4. Koridor transportasi dan jasa dalam kawasan konservasi	4.1 Jalan dan rel kereta			✓		Terdapat jalan yang termasuk dalam Zona Khusus
	4.2 Jalur layanan dan jasa			✓		Terdapat tower telekomunikasi
	4.3 Jalur dan kanal perkapalan				✓	
	4.4 Jalur penerbangan				✓	
5. Penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis didalam kawasan konservasi	5.1 Pemburuan, pembunuhan, dan pengumpulan satwa darat			✓		Burung dan babi hutan
	5.2 Pengumpulan tanaman darat atau produk tanaman (bukan kayu)			✓		Tanaman hias dan media tanaman (pakis, humus/ serasah)
	5.3 Pembalakan dan pemanenan kayu			✓		pengambilan kayu bakar untuk keperluan rumah tangga dari pohon yang tumbang
	5.4 Pemancingan, pembunuhan dan pemanenan sumberdaya air			✓		Memancing ikan untuk kebutuhan rumah tangga

Lampiran 2. Lembar Data Ancaman terhadap Kawasan Konservasi (TNGGP)

6. Campur tangan atau gangguan manusia di dalam kawasan konservasi	6.1 Kegiatan rekreasi dan wisata		✓		Sampah dan jalur ilegal wisata dan pendakian
	6.2 Perang, kerusuhan sipil dan latihan militer			✓	
	6.3 Penelitian, pendidikan dan kegiatan terkait pekerjaan lain di kawasan konservasi			✓	
	6.4 Kegiatan pengelola kawasan konservasi			✓	
	6.5 Vandalisme, keg. merusak atau ancaman thd pegawai atau pengunjung		✓		Vandalisme
7. Modifikasi sistem alam	7.1 Api dan penahan api (termasuk pembakaran secara sengaja)			✓	
	7.2 Bendungan, modifikasi hidrologis dan pengelolaan/pemanfaatan air		✓		Saluran irigasi dan <i>in take</i> air
	7.3a Peningkatan fragmentasi di kawasan konservasi			✓	
	7.3b Isolasi dari habitat alami lain			✓	
	7.3c "Efek tepi" lain terhadap nilai-nilai kawasan konservasi	✓			Kawasan berbentuk menjari, sehingga banyak berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat
	7.3d Kehilangan spesies keystone			✓	
8. Masalah spesies atau gen invasif dan bermasalah	8.1 Tanaman invasif non-native/asing (rerumputan)	✓			Sulibra, kaliandra, kecubung, markisa, bambu kirisik, kirinyuh, babakauan
	8.1a Satwa invasif non-native/asing		✓		Monyet ekor panjang
	8.1b Patogen (non-native atau native tetapi menimbulkan masalah baru/tingkat)			✓	
	8.2 Pengenalan materi genetic			✓	
9. Polusi yang masuk atau muncul di dalam kawasan konservasi	9.1 Saluran buangan rumah tangga atau saluran air limbah kota			✓	
	9.1a Saluran pembuatan atau air limbah dari fasilitas kawasan konservasi		✓		
	9.2 Limbah dan buangan industry, pertambangan dan militer			✓	
	9.3 Pembuangan dari pertanian dan kehutanan		✓		pada areal perluasan dari Perhutani
	9.4 Sampah dan sampah padat	✓			Sampah kegiatan pendakian, wisata, dan sampah rumah tangga
	9.5 Polusi yang terbawa udara			✓	
	9.6 Energi yang berlebih			✓	

Lampiran 2. Lembar Data Ancaman terhadap Kawasan Konservasi (TNGGP)

10. Peristiwa geologis	10.1 Gunung berapi			✓		1947 terakhir meletus dengan siklus 50 tahun dan data dari vulkanologi rutin disampaikan ke TNGGP
	10.2 Gempa bumi/Tsunami				✓	
	10.3 Salju/Tanah longsor		✓			Tanah longsor
	10.4 Erosi dan pengendapan garam/tanah			✓		
11. Perubahan iklim dan cuaca buruk	11.1 Perubahan dan kerusakan habitat				✓	
	11.2 Kekeringan				✓	
	11.3 Suhu ekstrim			✓		
	11.4 Badai dan banjir			✓		5 tahun sekali siklusnya kondisi tergantung lokasi
12. Ancaman budaya dan social spesifik	12.1 Hilangnya kaitan budaya, pengetahuan local dan/atau praktik pengelolaan		✓			Ziarah setiap Bulan Maulud (Bidang Cianjur dan Bidang Sukabumi ) dan pemanfaatan bambu untuk kincir (Bidang Sukabumi)
	12.2 Penurunan alami nilai-nilai penting situs budaya				✓	
	12.3 Kehancuran bangunan warisan budaya, taman, situs, dll				✓	

## PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN : Lembar Data 3

Isu	Kriteria	Skor: Pilih satu dari tiap pertanyaan	Komentar / Penjelasan	Langkah Kedepan
1. Status Hukum Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi ini <b>tidak pernah ditetapkan secara hukum</b> <i>Tidak ada KK seperti ini di Indonesia</i>	0	SK Penunjukan Nomor: SK. 174 Tahun 2003 serta SK dan peta penetapan SK.3683/Menhu- VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 (terlampir)	Ground check serta pemeliharaan jalur dan pal batas kawasan secara rutin
Apakah <b>kawasan konservasi</b> ini memiliki status hukum?	<b>Ada kesepakatan</b> bahwa kawasan konservasi tersebut harus ditegaskan secara umum tetapi prosesnya belum dimulai <i>Tidak ada KK seperti ini di Indonesia</i>	1		
Context	Kawasan konservasi tersebut <b>dalam proses penetapan</b> status hukum tetapi prosesnya belum selesai (termasuk situs yang ditetapkan dalam konvensi internasional, seperti Ramsar, atau hukum lokal/tradisional seperti kawasan konservasi masyarakat, yang belum memiliki status hukum atau perjanjian nasional) <i>Tidak ada KK seperti ini di Indonesia</i>	2		
	Kawasan konservasi tersebut <b>telah memiliki status hukum formal</b> <i>Seluruh KK di Indonesia telah memiliki status hukum formal, baik itu penunjukan parzial melalui SK Menhut/ Menhutbur/Menan/Gubernur Jenderal Hindia Belanda (staatsblat) ataupun SK Penunjukan Provinsi.</i>	3	<b>3</b>	
2. Peraturan kawasan konservasi	<b>Tidak ada peraturan</b> yang mengatur penggunaan lahan dan <b>Kegiatan di kawasan konservasi</b> <i>Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan di KK. Sehingga tidak mungkin disi 0</i>	0	Dilakukan review Zonasi TNGGP tahun 2020 berdasarkan SK. 245/KSDAE/SET.3/KSA.0/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dari pengaturan ruang terkait zonasi sebelumnya SK 356/KSDAE.SET/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 (terlampir)	Peningkatan sosialisasi zonasi kepada masyarakat serta pemantauan implementasi masing-masing zona pengelolaan
Apakah ada peraturan yang memadai untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan	<b>Ada beberapa peraturan</b> yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan-kekurangan besar <i>Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai kegiatan dan penggunaan lahan di KK. Sehingga tidak mungkin disi 1</i>	1		
Planning	Ada peraturan yang mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan di kawasan konservasi tetapi <b>masih ada beberapa kelemahan atau gap</b> <i>Apabila penataan Zonasi atau blok pengelolaan belum disahkan</i>	2		
	<b>Terdapat peraturan</b> untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan yang tidak sesuai didalam kawasan konservasi dan memberikan dasar yang sangat baik bagi pengelolaan <i>Apabila Penataan kawasan (zonasi/ blok) telah disahkan.</i>	3	<b>3</b>	

3.Penegakan Peraturan	Pegawai <b>tidak memiliki kapasitas/sumberdaya</b> yang efektif untuk menegakkan peraturan perundungan terkait kawasan konservasi  <i>Tidak ada staf/Resort yang khusus mengurus kawasan yang dinilai</i>	0		SDM Polhut dan Tenaga Pengaman Hutan Lainnya (TPHL) TNGGP sebanyak 44 orang dengan total anggaran pengamanan kawasan tahun 2021 sebesar Rp 451.380.000, (RKAKL Tahun 2021 terlampir) dan dilengkapi perangkat pendukung (SOP dan Juknis), seperti: 1) Petunjuk Teknis Pengamanan Hutan (SK.155/II/TU/II/2013); 2) SOP Penanganan Kasus Pengamanan Hutan (SK.322/IV.T.11/BT.4/2015); dan 3) SOP Pengendalian Kebakaran Hutan (SK.188/IV.T.11/BT.5/2015) (terlampir)	Optimalisasi sinergisitas dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan Aparat Penegak Hukum lainnya serta memutus alur tipih dengan mengedepankan penanganan terhadap aktor intelektual dan pemosal
	Terdapat <b>kekurangan besar dalam kapasitas/sumberdaya</b> pegawai untuk menegakkan peraturan perundungan terkait kawasan konservasi (cth. kekurangan kemampuan, tidak ada anggaran patrol, kurang dukungan kelembagaan)  <i>Terdapat staf/Polhut, namun anggaran patroli tidak tersedia, tidak terdapat prosedur yang jelas dalam penegakan hukum di lembaga pengelola</i>	1			
	Pegawai <b>memiliki kapasitas/sumberdaya yang memadai</b> untuk menegakkan peraturan perundungan terkait kawasan konservasi <b>tetapi masih ada kekurangan</b>  <i>Terdapat staf/Polhut/PPNS. Anggaran patroli tersedia namun belum secara spesifik menegaskan untuk patroli di kawasan yang dikelola. Penegakan hukum dimaksud tidak selalu untuk yustisia, namun juga termasuk di dalamnya kegiatan sosialisasi peraturan</i>	2			
	Pegawai <b>memiliki kapasitas/sumberdaya yang sangat baik</b> untuk menegakkan peraturan perundungan terkait kawasan konservasi  <i>Terdapat staf/Polhut/PPNS beserta anggaran patroli/ pendukung lainnya. Terdapat prosedur yang jelas dalam penegakan hukum di lembaga pengelola</i>	3	3		
4.Tujuan utama dari kawasan konservasi	Belum ada <b>tujuan</b> yang disepakati untuk kawasan konservasi ini  <i>Belum menyusun Rencana Pengelolaan (RP) yang memuat tujuan pengelolaan secara spesifik</i>	0		Tujuan sudah ada dalam RP hanya pelaksanaannya belum seluruhnya terlaksana karena disesuaikan dengan dinamika pengelolaan (RP tahun 2019 - 2028, Renstra 2020 - 2024, Renstra TNGGP periode tahun 2020 - 2024, dan Renja BBTNGGP	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNGGP Periode 2019 - 2028, Renstra TNGGP periode tahun 2020 - 2024, dan Renja BBTNGGP
	Kawasan konservasi ini <b>telah memiliki tujuan</b> yang disepakati, <b>tetapi tidak dikelola sesuai tujuan-tujuan ini</b>  <i>Rencana Pengelolaan (RP) sudah disusun dan memuat tujuan pengelolaan secara spesifik, namun kegiatan tidak mengacu pada tujuan yang ditetapkan</i>	1			
	Kawasan konservasi ini <b>telah memiliki tujuan</b> yang disepakati, tetapi pengelolaan yang dilakukan <b>hanya memenuhi beberapa tujuan tersebut</b>  <i>Kegiatan esensial sesuai tujuan pengelolaan yang direncanakan dalam RP sebagian telah dilaksanakan</i>	2	2		
	Kawasan konservasi ini <b>telah memiliki tujuan</b> yang disepakati dan pengelolaan <b>telah memenuhi semua tujuan tersebut</b>  <i>Se semua kegiatan esensial untuk mencapai tujuan pengelolaan dalam RP telah dilakukan</i>	3			

5. Desain kawasan konservasi	Apakah kawasan konservasi memiliki luasan dan bentuk yang tepat untuk melindungi spesies, habitat, proses-proses ekologis dan tangkapan air sesuai kepentingan konservasi kuncinya?  Planning	Desain kawasan konservasi yang <b>tidak memadai</b> berarti pencapaian tujuan utama kawasan konservasi yang sangat sulit <i>Kawasan tidak memadai dari sisi luas; bentuk; dan lokasi untuk upaya konservasi tujuan pengelolaan.</i>	0		Bentuk kawasan yang menjadi tidak kompak. Sebagian kawasan berbatasan langsung dengan tanah milik sehingga terdapat kecenderungan fragmentasi habitat satwa liar dan sudah dilakukan revisi zonasi tahun 2020 (Peta Zonasi SK. 245/KSDAE/SET.3/KSA.0/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan Peta Kerja Resort terlampir)	Pembinaan daerah penyangga dalam rangka homorange satwa
		Desain kawasan konservasi yang <b>tidak memadai</b> berarti pencapaian tujuan utama yang sulit <b>tetapi beberapa kegiatan mitigasi tengah dilakukan</b> (cth. perjanjian dengan pemilik lahan yang bertetangga untuk koridor satwa atau pengenalan <b>manajemen DAS yang sesuai</b> ) <i>Kawasan tidak memadai namun ada upaya membangun kesepakatan dengan pemangku lahan sekitarnya untuk konservasi tujuan pengelolaan sebagai contoh perjanjian dengan pemilik lahan yang bertetangga untuk koridor satwa atau pengenalan manajemen DAS yang sesuai.</i>	1			
		Desain kawasan konservasi <b>tidak signifikan menghalangi pencapaian tujuan, tetapi perlu ditingkatkan</b> (cth. terkait dengan proses-proses ekologis skala besar yang terjadi)  <i>Desain kawasan relative memadai namun perlu ditingkatkan antara lain melalui upaya koneksi dengan kawasan konservasi lain; adanya areal penyangga yang merupakan perluasan habitat yang ada, dll</i>	2	2		
		Desain kawasan konservasi <b>membantu pencapaian tujuannya; desain memadai untuk konservasi spesies dan habitat</b> ; dan menjaga proses-proses ekologis seperti aliran permukaan dan bawah tanah pada skala DAS, pola gangguan alam, dll <i>Kawasan memadai baik secara luas, lokasi dan bentuknya sehingga tidak menghalangi pencapaian tujuan</i>	3			
6. Pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi	Apakah batas kawasan diketahui dan dikukuhkan?  Process	Batas kawasan konservasi <b>tidak diketahui oleh otoritas pengelolaan atau penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga</b> <i>Petugas dan masyarakat tidak mengetahui batas kawasan</i>	0		Masih adanya tumpang tindih batas kawasan dengan tanah milik (peta kawasan dan surat dari TNGGP ke BPKH perihal kondisi kawasan terlampir)	Koordinasi dengan BPKH, update data di lapangan, dan mendorong untuk penyempurnaan lampiran SK penetapan
		Batas kawasan konservasi <b>diketahui oleh otoritas pengelolaan</b> tetapi tidak diketahui oleh penduduk setempat/pengguna lahan yang bertetangga <i>Hanya petugas yang mengetahui batas kawasan</i>	1			
		Batas kawasan konservasi <b>diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk local/pengguna lahan yang bertetangga tetapi tidak dikukuhkan dengan tepat</b> <i>Petugas dan masyarakat mengetahui batas kawasan namun tidak tepat (tidak sesuai antara di peta dan di lapangan atau sebagian kawasan belum diterima oleh masyarakat)</i>	2	2		
		Batas kawasan konservasi <b>diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk local/pengguna lahan yang bertetangga dan dikukuhkan dengan tepat</b> <i>Tata batas sudah temu gelang dan terdapat BA Tata Batas yang ditandai tangani para pihak. Dibuktikan dengan tidak adanya komplain terkait pal batas</i>	3			

<b>7. Rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan jangka Panjang/RPJp)</b>  Apakah ada rencana pengelolaan (RPJp) dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan?  <b>Planning</b>	<p><b>Tidak ada</b> rencana pengelolaan untuk Kawasan Konservasi ini <i>RP belum disusun</i></p> <p><b>Rencana pengelolaan <b>tengah disiapkan atau telah disiapkan</b> tetapi belum diimplementasikan <i>Cukup jelas</i></b></p> <p><b>Rencana pengelolaan <b>telah ada tetapi baru sebagian yang diimplementasikan</b> karena kendala pendanaan atau masalah lain <i>Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) telah disahkan dan sebagian kegiatan penting telah dilakukan (tercantum dalam alokasi budget pengelola atau hibah)</i></b></p> <p><b>Rencana pengelolaan <b>telah ada dan tengah diimplementasikan</b> <i>Kegiatan esensial dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RP) telah dilakukan (tercantum pada alokasi budget pengelola atau didanai melalui kerjasama (MoU) dengan pihak lain (Pemda/LSM/NGO/Universitas/private sector)</i></b></p>	0		<p>Rencana pengelolaan telah ada dan tengah diimplementasikan (RP Periode Tahun 2019-2028 terlampir)</p> <p>Melaksanakan pengelolaan kawasan TNGGP berdasarkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNGGP Periode 2019 - 2028, Renstra TNGGP periode tahun 2020 - 2024, dan Renja BBTNGGP</p>
		1		
		2		
		3	3	
	<b>Nilai tambahan: Planning</b>			
7a. Proses perencanaan	Proses perencanaan memberikan kesempatan yang cukup bagi parapihak untuk mempengaruhi rencana pengelolaan <i>Konsultasi publik terhadap RP dengan melibatkan para pihak</i>	1	1	Telah dilakukan konsultasi publik para pihak dalam penyusunan RP Berita Acara Konsultasi Publik terlampir pada dokumen RP Implemenatai dan monitoring pelaksanaan RP
7b. Proses perencanaan	Terdapat jadwal dan proses review periodik dan updating rencana pengelolaan <i>Terdapat rencana review/ evaluasi RP. Apabila RP telah disusun sesuai dengan PP Nomor 28 tahun 2011 dengan periode 10 tahun</i>	1	1	Telah dilaksanakan review RP pada tahun 2020 Penyesuaian hasil evaluasi
7c. Proses perencanaan	Hasil dari monitoring, riset dan evaluasi secara rutin dimasukkan kedalam perencanaan <i>Cukup jelas</i>	1	1	Hasil monev dan riset baik intern maupun ekstern sudah menjadi salah satu bahan pertimbangan program perencanaan Pengembangan riset dan monev serta memperluas ruang lingkup bidang kerjasama
<b>8. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn)</b>  Apakah ada Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan apakah rencana tersebut tengah diimplementasikan?  <b>Planning/Outputs</b>	<p><b>Tidak ada</b> Rencana Pengelolaan Jangka Pendek <i>Kawasan tidak memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn)</i></p> <p><b>Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek tetapi baru beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan</b> <i>Kawasan memiliki Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) dan telah diimplementasikan sebagian</i></p> <p><b>Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan <b>banyak kegiatan telah diimplementasikan</b> <i>Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) sebagian besar telah diimplementasikan</i></b></p> <p><b>Terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dan <b>semua kegiatan telah diimplementasikan</b> <i>Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) diimplementasikan seluruhnya</i></b></p>	0		<p>Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn) sudah diimplementasikan (RPJPn terlampir)</p> <p>Monitoring dan evaluasi capaian RPJPn dan kesesuaian dengan Renstra dan RP</p>
		1		
		2		
		3	3	

<b>9. Inventarisasi sumberdaya</b>  Apakah anda telah memiliki cukup informasi untuk mengelola kawasan ini?  <b>Input</b>	<p><b>Terdapat sedikit informasi</b> yang tersedia tentang habitat, spesies dan nilai budaya yang kritis dalam kawasan konservasi</p> <p><i>Belum pernah dilakukan inventarisasi potensi atau survey potensi kawasan</i></p>	0		<p>Sudah dilakukan monitoring satwa prioritas data satwa prioritas 2015-2020 pada statistik 2020 &amp; rekap perjumpaan satwa dan tumbuhan 2021 pada aplikasi SIDAK, laporan kegiatan invet/ monitoring satwa, peta sebaran satwa liar terlampir</p>	<p>Monitoring secara timeseries dan menambah inventarisasi jenis lainnya terutama flora serta menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan inventarisasi TSL</p>
	<p><b>Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi</b> tidak memadai untuk mendukung perencanaan dan pembuatan keputusan</p> <p><i>Inventarisasi/ survey potensi/ monitoring kawasan dilakukan namun belum mengarah untuk kepada tujuan pengelolaan</i></p>	1			
	<p><b>Informasi tentang habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi</b> telah memadai untuk <b>sebagian besar area kunci</b> perencanaan dan pembuatan keputusan</p> <p><i>Inventarisasi/ survey potensi/ monitoring kawasan dilakukan terhadap aspek-aspek fitur utama kawasan</i></p>	2	2		
	<p><b>Informasi</b> habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi <b>telah memadai untuk mendukung semua area perencanaan</b> dan pengambilan keputusan</p> <p><i>Kegiatan Inventarisasi/ survey potensi/ monitoring kawasan dilakukan pada semua fitur-fitur kawasan dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM)</i></p>	3			
<b>10. Sistem perlindungan</b>  Apakah system telah memadai untuk mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya di dalam Kawasan Konservasi?  <b>Process/Outcome</b>	<p><b>Sistem perlindungan (patrol, perijinan, dll) tidak ada atau tidak efektif</b> mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya</p> <p><i>Tidak terdapat sistem perlindungan yang dibangun. Pernah dilakukan patroli kawasan dan belum ada sistem pemanfaatan</i></p>	0		<p>Sistem dan juknis sudah ada, pemanfaatan yang terkontrol, sistem kuota, dan simaksi (MoU kerjasama terlampir)</p>	<p>Peningkatan sistem menggunakan aplikasi</p>
	<p><b>Sistem perlindungan hanya efektif sebagian</b> dalam mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya</p> <p><i>Misal sistem baru diterapkan sebagian (hanya patroli saja namun belum ada sistem pemanfaatan)</i></p>	1			
	<p><b>Sistem perlindungan secara moderat efektif</b> mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya</p> <p><i>Terdapat kegiatan patroli, protap patroli dan pengurusan SIMAKSI namun hanya pada sebagian kawasan</i></p>	2			
	<p><b>Sistem perlindungan sebagian besar atau seluruhnya efektif</b> dalam mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya</p> <p><i>Sistem patroli, pengurusan SIMAKSI hingga kerjasama pemanfaatan HHBK sudah berjalan, terdapat protapnya. Terdapat sistem patroli yang baik dan menjangkau wilayah yang rawan.</i></p>	3	3		

11. Riset	<b>Tidak ada survey atau riset di kawasan konservasi</b> <i>Belum ada penelitian atau survey kawasan</i>	0		Sistem penelitian online ( <a href="https://www.gedepangrango.org/penelitian/fokus-topik-penelitian/">https://www.gedepangrango.org/penelitian/fokus-topik-penelitian/</a> ; <a href="https://www.gedepangrango.org/penelitian/permohonan-penelitian/">https://www.gedepangrango.org/penelitian/permohonan-penelitian/</a> ; <a href="https://www.gedepangrango.org/periinan/">https://www.gedepangrango.org/periinan/</a> ), presentasi hasil riset, hasil riset dipublikasikan pada website ( <a href="https://www.gedepangrango.org/penelitian/cari-penelitian/">https://www.gedepangrango.org/penelitian/cari-penelitian/</a> ) dan e library TNGGP (elibrary.gedepangrango.org), kerjasama riset dengan Perguruan Tinggi (Daftar penelitian di TNGGP dari tahun 1996 sampai sekarang terlambir), serta laporan penelitian bioprospecting 2020	Optimalisasi publikasi hasil-hasil riset melalui website dan media sosial
	<b>Ada sedikit survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi</b>	1			
	<i>Penelitian masih belum variatif (objek masih homogen). Data yang dihasilkan masih berupa cuplikan-cuplikan data dan belum memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan</i>				
	<b>Ada cukup survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi</b> <i>Penelitian sudah variatif (objek penelitian beragam/heterogen). Ada database namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan</i>	2			
12. Pengelolaan sumberdaya	<b>Ada program survey dan riset yang komprehensif dan terintegrasi</b> yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan	3	3	Sudah dilakukan kegiatan pemulihian ekosistem sesuai dengan melalui Kajian Pemulihian Ekosistem dan Rencana Pengelolaan Ekosistem, Rencana Pemulihian Ekosistem Tahun 2020 - 2024 pengkayaan dan penanaman secara intensif serta pembangunan demplot. Monitoring 3 jenis satwa prioritas (laporan monit/ invent SDA terlambir)	Inventarisasi dan monitoring sumber daya menggunakan aplikasi dan sistem grid
	<b>Pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan</b> <i>Kawasan tidak/ belum dikelola. Hanya ada aktifitas pengamatan</i>	0			
	<b>Sangat sedikit persyaratan</b> untuk pengelolaan aktif habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis tengah dilakukan. Kebutuhan untuk pengelolaan habitat, spesies dan proses ekologis dan nilai budaya	1			
	<i>Pengelolaan terhadap fitur utama masih minimal. Kegiatan terkait tujuan pengelolaan sangat terbatas</i>				
	<b>Banyak persyaratan</b> pengelolaan intensif habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis tengah dilakukan tetapi beberapa isu kunci belum diperhatikan	2			
Process	<i>Pengelolaan terhadap fitur utama kawasan sudah dilakukan, tetapi belum mencakup penyelesaian permasalahan terhadap fitur utama. Kegiatan terkait tujuan pengelolaan telah dilakukan</i>				
	<b>Persyaratan pengelolaan aktif habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis secara substansial atau sepenuhnya tengah dilaksanakan</b> <i>Pengelolaan terhadap fitur utama dan fitur kawasan lainnya sudah dilakukan termasuk upaya mangatasi permasalahan untuk mencapai tujuan pengelolaan</i>	3	3		

13. Jumlah pegawai  Apakah sudah ada cukup pegawai untuk mengelola Kawasan Konservasi  Inputs	Tidak ada pegawai  <i>Pegawai yang dimaksud adalah yang bertugas di kawasan yang dinilai. Untuk UPT BKSDA adalah petugas resort</i>	0		Kurang secara fungsi dan jumlah (data kepegawaian dan kondisi SDM terlampir)	Perlu adanya penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK)
	Jumlah pegawai <b>tidak mencukupi</b> untuk kegiatan pengelolaan yang penting  <i>Pegawai belum cukup, baik jumlah dan fungsi (pengelolaan yang penting : tenaga administrasi dan teknis)</i>	1			
	Jumlah pegawai <b>dibawah tingkat optimum</b> untuk kegiatan pengelolaan kritis  <i>Pegawai cukup secara fungsi (tenaga administrasi dan teknis) namun jumlahnya kurang</i>	2	<b>2</b>		
	Jumlah pegawai <b>sudah mencukupi</b> kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi  <i>Pegawai cukup secara fungsi dan jumlah</i>	3			
14. Pelatihan Pegawai  Apakah pegawai cukup terlatih untuk memenuhi tujuan pengelolaan?  Inputs/Process	Pegawai <b>kurang</b> memiliki keahlian yang diperlukan untuk pengelolaan kawasan konservasi  <i>Tidak ada staf/petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan pengelolaan</i>	0		Secara umum staf fungsional sudah terlatih namun keahliannya perlu ditingkatkan dan perlu penambahan jumlah (data pelatihan dan pendidikan pegawai TNGGP terlampir)	Sinkronisasi kebutuhan Diklat di Satker dengan Balai Diklat dan kerjasama dengan LIPI, Litbang, dan Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri dalam peningkatan keahlian staf
	Staf terlatih dan keahlian pegawai <b>relatif rendah</b> untuk kebutuhan kawasan konservasi  <i>Jumlah dan tingkat keahlian staf kurang dan belum sesuai dengan tujuan pengelolaan</i>	1			
	Staf terlatih dan keahlian pegawai memadai, tetapi <b>perlu ditingkatkan</b> untuk sepenuhnya mencapai tujuan pengelolaan  <i>Jumlah dan tingkat keahlian staf memadai namun perlu ditingkatkan sesuai tujuan pengelolaan</i>	2	<b>2</b>		
	Staf terlatih dan keahlian <b>sesuai dengan kebutuhan</b> pengelolaan kawasan konservasi. Staf terlatih dan keahliannya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi  <i>Keahlian staf beragam dari mulai administrasi perkantoran hingga teknis sesuai tujuan pengelolaan. Misal. Kawasan dengan tujuan pengelolaan pelestarian kupu-kupu, memiliki staf yang memahami identifikasi kupu-kupu</i>	3			

15. Anggaran saat ini  Apakah anggaran saat ini sudah mencukupi?  Inputs	<b>Tidak ada anggaran</b> untuk pengelolaan kawasan konservasi <i>Sudah jelas</i>	0		Anggaran pengelolaan kawasan belum memadai (usulan kebutuhan anggaran 2021 dan RKAKL 2021, daftar kerjasama dalam dan luar negeri, serta hibah tahun 2016 - 2020 terlampir)	Usulan peningkatan anggaran dan kerjasama dengan mitra untuk mengisi gap anggaran yang tersedia
	Anggaran yang tersedia <b>tidak mencukupi</b> kebutuhan pengelolaan dan menimbulkan kendala serius dalam kapasitas <b>untuk mengelola</b> <i>Sudah jelas</i>	1			
	Anggaran yang tersedia <b>mencukupi tetapi perlu ditingkatkan</b> untuk sepenuhnya mencapai pengelolaan yang efektif <i>Sudah jelas</i>	2	<b>2</b>		
	Anggaran yang tersedia <b>mencukupi dan memenuhi</b> seluruh <b>kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi</b> <i>Sudah jelas</i>	3			
16. Kepastian anggaran  Apakah ada kepastian anggaran?  Inputs	<b>Tidak ada kepastian</b> anggaran untuk kawasan konservasi dan pengelolaan sepenuhnya tergantung pada pihak luar atau pendanaan sangat tidak pasti <i>Tidak ada anggaran spesifik untuk pengelolaan kawasan</i>	0		Kepastian anggaran sudah tersedia dalam RKAKL namun demikian perlu diperhatikan prioritas nasional yang dapat berakibat pada penghematan anggaran (RKAKL 2021 sebelum penghematan dan RKAKL revisi terakhir)	Optimalisasi kegiatan dengan menggunakan fasilitas yang ada (rapat dan pelatihan daring) serta upaya menciptakan inovasi dengan mitra melalui penyusunan proposal dan intensifikasi kerjasama
	Ada <b>sedikit kepastian</b> anggaran dan kawasan konservasi tidak dapat berfungsi secara memadai tanpa bantuan dana pihak luar <i>hanya ada alokasi anggaran pengamanan untuk kawasan</i>	1			
	Ada <b>cukup kepastian</b> anggaran inti (core budget) untuk kegiatan regular kawasan konservasi tetapi banyak inovasi dan inisiatif yang tergantung pendanaan dari luar <i>Terdapat alokasi anggaran pengelolaan untuk kawasan, APBN maupun non APBN</i>	2	<b>2</b>		
	Ada <b>kepastian</b> anggaran untuk Kawasan Konservasi dan memenuhi pengelolaan <i>Ada alokasi anggaran APBN/non APBN yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan sesuai tujuan</i>	3			
17. Pengelolaan anggaran  Apakah anggaran dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan yang penting?  Process	Pengelolaan anggaran <b>tidak baik</b> dan secara signifikan mengurangi efektifitas pengelolaan <i>Misalnya, anggaran yang turun terlambat pada tahun berjalan</i>	0		Sebagian besar penganggaran sudah sesuai dengan prioritas mandat pengelolaan pada RP dan Renstra, namun porsi dukungan anggaran lebih dititikberatkan pada Renstra yang memperhatikan prioritas nasional (Matrik RP, Renstra, dan RKAKL terlampir)	Prioritas penganggaran disesuaikan dengan RP dan Renstra
	Pengelolaan anggaran <b>kurang baik</b> dan mengurangi efektifitas <i>Anggaran tidak membayai kegiatan pengelolaan prioritas</i>	1			
	Pengelolaan anggaran <b>sudah memadai</b> tetapi perlu ditingkatkan <i>anggaran yang ada digunakan untuk membayai kegiatan sesuai dengan tujuan pengelolaan</i>	2	<b>2</b>		
	Pengelolaan anggaran <b>sangat baik</b> dan memenuhi kebutuhan pengelolaan <i>Anggaran sesuai dengan rencana kegiatan pada RP</i>	3			

18. Perlengkapan	Apakah perlengkapan yang ada telah memenuhi kebutuhan pengelolaan?	Input	0	Ada tetapi tidak berfungsi optimal karena rusak atau hilang (daftar BMN dan keberadaan BMN, daftar barang persediaan, sarana dan prasarana pengelolaan terlampir)	Penghapusan BMN yang rusak dan hilang serta mengusulkan penggantinya.
			<i>Tidak ada perlengkapan</i>		
			1		
			<i>Terdapat perlengkapan namun masih sangat kurang untuk pengelolaan</i>		
			2	<b>2</b>	
			<i>Terdapat perlengkapan dan fasilitas tetapi <b>masih ada kekurangan</b> yang menghambat pengelolaan</i> <i>Perlengkapan yang ada belum sepenuhnya memadai/ minimal untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan</i>		
			3		
			<i>Perlengkapan dan fasilitas yang ada <b>telah memadai</b></i> <i>Terdapat perlengkapan (perlengkapan lapangan, mobilitasi, fasilitas pelayanan, bangunan pengelola) yang memadai untuk mendukung pengelolaan - pengecualian untuk kawasan dengan luasan kecil (&lt;10 hektar), sarana digabung dengan kawasan lainnya.</i>		
19. Pemeliharaan perlengkapan	Apakah perlengkapan yang ada dipelihara secara memadai?	Process	0	Pemeliharaan ada namun hanya terbatas untuk skala prioritas yang penting (anggaran kegiatan pemeliharaan terlampir pada RKAKL 2021)	Penambahan penganggaran untuk peningkatan pemeliharaan peralatan (sarana dan prasarana), pendataan, pengusulan serta pengadaan barang-barang pengganti yang sudah rusak dan lewat masa (kadaluarsa) tidak compatible; serta menyiapkan SDM terlatih dalam pemeliharaan BMN dan menyiapkan ruang penyimpanan BMN yang memadai
			<i>Tidak ada pemeliharaan</i>		
			1		
			<i>Ada pemeliharaan yang bersifat <b>ad hoc</b> untuk perlengkapan dan fasilitas</i> <i>Pemeliharaan dilakukan secara insidentil</i>		
			2	<b>2</b>	
			<i>Ada pemeliharaan dasar untuk perlengkapan dan fasilitas</i> <i>Pemeliharaan dilakukan pada perlengkapan dan fasilitas penting</i>		
			3		
			<i>Perlengkapan dan fasilitas <b>dipelihara secara memadai</b></i> <i>semua perlengkapan dan fasilitas dipelihara dan berfungsi dengan baik</i>		

<p><b>20. Pendidikan dan penyadaran</b></p> <p>Apakah ada perencanaan program pendidikan dan penyadaran untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan pengelolaan?</p> <p><i>Process</i></p>	<p>Tidak ada program pendidikan dan penyadaran</p> <p><i>Sudah jelas</i></p> <p>Ada program pendidikan dan penyadaran yang <b>terbatas dan bersifat ad hoc</b></p> <p><i>Kegiatan bersifat tidak terprogram dan insidental</i></p> <p>Ada program pendidikan dan penyadaran tetapi hanya sebagian memenuhi kebutuhan dan <b>perlu ditingkatkan</b></p> <p><i>Kegiatan terprogram namun dinilai kurang secara kuantitas</i></p> <p>Terdapat program pendidikan dan penyadaran yang <b>memadai dan sepenuhnya dilaksanakan</b></p> <p><i>Terprogram dan dilaksanakan dengan cukup</i></p>	0		<p>Ada program kegiatan pendidikan konservasi lingkungan serta program peningkatan penyadartahuan masyarakat sekitar kawasan, namun masih kurang dalam kuantitas (hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan penyadartahuan masyarakat dan laporan school visit dan visit to school, Perdes tentang Konservasi di TNGGP terlampir)</p>	<p>Peningkatan kuantitas kegiatan pendidikan dan penyadartahuan masyarakat sekitar kawasan serta meningkatkan kerjasama dengan mitra dalam program pendidikan dan penyadaran untuk masyarakat sekitar kawasan baik luring maupun daring</p>
<p><b>21. Perencanaan penggunaan lahan dan air</b></p> <p>Apakah perencanaan penggunaan lahan dan air mempertimbangkan Kawasan Konservasi dan membantu pencapaian tujuan Kawasan Konservasi?</p> <p><i>Planning</i></p>	<p>Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan <b>tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi</b> dan kegiatan/kebijakan yang <b>merugikan kelangsungan kawasan</b></p> <p><i>Pemanfaatan air di luar kawasan konservasi berekosistem rawa/gambut yang berlebihan dan membuat rawa menjadi kering dan rentan kebakaran. Pembangunan di luar yang membuat kawasan terisolasi atau tidak terkoneksi dengan KK Lainnya</i></p> <p>Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan <b>tidak memperhatikan kebutuhan kawasan konservasi</b>, tetapi kegiatan yang ada <b>tidak merugikan kelangsungan kawasan</b></p> <p><i>RTRW kurang mendukung fungsi kawasan Contoh : pemanfaatan air di luar kawasan konservasi yang terletak di hulu</i></p> <p>Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sebagian <b>memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi</b></p> <p><i>RTRW sebagian mendukung fungsi kawasan.</i></p> <p>Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan <b>sepenuhnya memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi</b></p> <p><i>RTRW sesuai kaidah. Pembangunan di sekitar kawasan telah memadukan dengan kawasan konservasi, misal menyediakan koneksi dengan KK lain, menyediakan buffer/penyangga kawasan, pengelolaan mempertimbangkan sistem DAS yang ada dll.</i></p>	0		<p>RTRW sudah ditetapkan oleh Pemda isinya mendukung keberadaan kawasan TNGGP dan ditetapkannya Cagar Biosfer Cibodas (CBC) (RTRW perihal akomodir keberadaan kawasan lindung dan Cagar Biosfer Cibodas, Revisi Zonasi TNGGP 2020, dan SK Areal Pemanfaatan Air, dan terlampir)</p>	<p>Implementasi pembangunan melalui perencanaan di tingkat tapak (musrenbang serta turut serta dalam forum-forum komunikasi pembangunan)</p>

Nilai tambahan: Perencanaan lahan dan air					
21a: Perencanaan lahan dan air untuk konservasi habitat	<p>Perencanaan dan pengelolaan di dalam DAS atau lanskap (bentang lahan) lokasi kawasan konservasi <b>memasukkan provisi untuk kondisi lingkungan yang memadai</b> (cth. volume, kualitas dan waktu aliran air, tingkat polusi air, dll) untuk menjaga habitat yang relevan</p> <p><i>Lansekap yang didalamnya terdapat KK sudah mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang memadai untuk menjamin keberlangsungan habitat-habitat penting</i></p> <p><i>Contoh : kawasan di hilir, perencanaan di hulu harus mempertimbangkan potensi polusi air ke dalam kawasan</i></p>	1	1	Satker sudah menyusun Perencanaan lahan dan air melalui SK Pemanfaatan Air (terlampir)	Sosialisasi SK Pemanfaatan Air dan implementasi pemanfaatan air sesuai dengan peraturan perundangan yang baru
21b: Perencanaan lahan dan air untuk keterhubungan (konektifitas)	<p><b>Pengelolaan koridor</b> penghubung kawasan konservasi memberikan jalur bagi <b>satwa liar</b> menuju habitat kunci diluar kawasan konservasi (cth. memungkinkan ikan bermigrasi antara lokasi pemijahan air tawar dan laut atau memungkinkan migrasi satwa)</p> <p><i>Apakah koridor sebagai jalur penghubung satwa berfungsi dengan baik.</i></p>	1	1	RTRW sudah ditetapkan oleh Pemda isinya mendukung keberadaan kawasan TNGGP dan ditetapkannya Cagar Biosfer Cibodas (CBC)	Monitoring dan komitmen dalam implementasi pelaksanaan pembangunan
21c: Perencanaan lahan dan air untuk jasa-jasa ekosistem dan konservasi spesies	<p>"Perencanaan <b>menjawab kebutuhan khusus ekosistem</b> dan/atau kebutuhan spesies tertentu pada skala ekosistem (cth. volume, kualitas dan waktu aliran air tawar untuk kelangsungan spesies tertentu, pengelolaan api untuk menjaga habitat savana, dll)"</p> <p><i>Apakah pembangunan di sekitar kawasan konservasi, mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di dalam kawasan.</i></p>	1	1	Sudah adanya peraturan baik perizinan maupun pemanfaatan sumber daya air yang memperhatikan jasa-jasa ekosistem dan konservasi spesies (SK Penetapan Areal Pemanfaatan Air, Peta Areal Pemanfaatan Air, dan SK Izin Pemanfaatan Air dilampirkan)	Monitoring pemanfaatan air
22. Pemerintah dan swasta di sekitar	<p><b>Tidak ada komunikasi</b> antara pengelola kawasan dan otoritas/pengelolahan dan air di sekitar</p> <p><i>Sudah jelas</i></p>	0		<p>Adanya kerjasama dengan Gedepahala dan mitra pengguna air lainnya (Laporan kegiatan Gedepahala, daftar mitra kerjasama, Pertek, dan SK IPA tahun 2019 dan 2020 terlampir)</p>	Monitoring pelaksanaan RKT IPA
Apakah ada kerjasama dengan pengguna lahan dan air di sekitar?  Process	<p><b>Ada komunikasi</b> antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air disekitar <b>tetapi hanya sedikit atau tidak ada kerjasama</b></p> <p><i>Sudah jelas</i></p>	1			
	<p><b>Ada komunikasi</b> antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air disekitar, <b>tetapi hanya ada kerjasama terbatas</b></p> <p><i>Kerjasama pemanfaatan/ penggunaan di luar kawasan</i></p>	2			
	<p><b>Ada komunikasi</b> regular antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air disekitar, dan <b>ada kerjasama substantif</b> dalam pengelolaan kawasan konservasi</p> <p><i>Kerjasama antara pengelola dengan mitra disertai dengan forum penguatan. Misal, terdapat forum pengelolaan seperti mitra Kutai, Gedepahala, dll</i></p>	3	3		

Process	<b>23. Masyarakat adat dan Masyarakat Asli/tradisional</b>  Apakah masyarakat adat dan masyarakat aseli/tradisional yang tinggal atau secara regular menggunakan kawasan konservasi dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi?	Masyarakat adat dan masyarakat aseli/tradisional <b>tidak dapat memberikan masukan</b> dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi <i>Sudah jelas</i>	<b>0</b>		Tidak ada masyarakat adat	
		Masyarakat adat dan masyarakat aseli/tradisional <b>dapat memberikan sedikit masukan</b> dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak secara langsung berperan dalam pengelolaan  <i>Masyarakat adat terlibat dalam konsultasi publik dalam penyusunan RP dan zonasi/ blok</i>	<b>1</b>			
		Masyarakat adat dan masyarakat aseli/tradisional <b>se secara langsung berkontribusi</b> terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi <b>tetapi keterlibatannya perlu ditingkatkan</b> <i>masyarakat adat dapat terlibat dalam penentuan sebagian arah pengelolaan, misal zonasi/ blok, jenis dan arah kegiatan dalam RP, kegiatan-kegiatan dalam zona/ blok tradisional.</i>	<b>2</b>			
		Masyarakat adat dan masyarakat aseli/tradisional <b>se secara langsung berpartisipasi</b> dalam semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth. Co-management <i>Sudah jelas.</i>	<b>3</b>			
Process	<b>24. Masyarakat lokal</b>  Apakah masyarakat lokal yang tinggal ada berdekatan dengan kawasan konservasi dapat memberikan masukan?	Masyarakat lokal <b>tidak dapat memberikan masukan</b> dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi  <i>Sudah jelas</i>	<b>0</b>		Masyarakat berkontribusi dalam pengambilan keputusan untuk optimalisasi pengelolaan kawasan (terlampir Berita Acara Konsultasi Publik dokumen pengelolaan kawasan dan SK Bupati Cianjur dan SK Gubernur Jawa Barat tentang Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer)	Perlu mendorong implementasi pengelolaan kawasan yang melibat masyarakat melalui Cagar Biosfer Cibodas dan
		Masyarakat lokal <b>dapat sedikit memberikan masukan</b> dalam diskusi terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan  <i>Masyarakat lokal terlibat dalam konsultasi publik dalam penyusunan RP dan</i>	<b>1</b>			
		Masyarakat lokal <b>se secara langsung berkontribusi</b> terhadap beberapa pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi keterlibatannya dapat ditingkatkan <i>masyarakat lokal dapat terlibat dalam penentuan sebagian arah pengelolaan, misal zonasi/ blok, jenis dan arah kegiatan dalam RP, kegiatan-kegiatan dalam zona/ blok tradisional.</i>	<b>2</b>			
		Masyarakat lokal <b>se secara langsung berpartisipasi</b> terhadap semua pengambilan keputusan yang relevan terkait pengelolaan kawasan konservasi, cth co-manajemen <i>sudah jelas</i>	<b>3</b>	<b>3</b>		

Nilai tambahan: Masyarakat lokal					
24 a. Dampak terhadap masyarakat	<p><b>Terdapat komunikasi dan kepercayaan yang terbuka</b> antara masyarakat lokal dan/atau tradisional, para pihak dan pengelola kawasan konservasi</p> <p><i>Ada forum reguler</i></p>	1	1	Adanya komunikasi rutin antara pengelola dengan para pihak (Gedepahala, volunteer, mitra pengguna air, forum wisata, SK Pembentukan Saka Wanabakti Kab. Bogor, PKS mitra terlampir)	Mendorong program-program nyata dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi
24b. Dampak terhadap masyarakat	<p><b>Terdapat program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b></p> <p><i>Sudah jelas</i></p>	1	1	Adanya program peningkatan kesejahteraan masyarakat namun sifatnya masih terbatas terkait dukungan anggaran (SK Penetapan Desa Binaan, SK Pembentukan KTH, dan BA Pembentukan KTH, RKT terkait pemberdayaan masyarakat terlampir)	Peningkatan usulan anggaran, mengembangkan inovasi kebutuhan masyarakat sekitar melalui kerjasama dengan mitra
24c. Dampak terhadap masyarakat	<p>Masyarakat lokal dan/atau tradisional <b>secara aktif mendukung kawasan konservasi</b></p> <p><i>Terdapat peraturan daerah/ peraturan desa, adat istiadat (aktif) yang mendukung kelestarian kawasan</i></p>	1	1	Ada beberapa desa yang sudah mempunyai Peraturan Desa terkait pemeliharaan hutan dan mata air (SK Bupati Cianjur dan SK Gubernur Jawa Barat FKKP Cagar Biosfer Cibodas dan Peraturan Desa Naggerang - Bogor, Kesepakatan Konservasi antara BBTNGGP dengan beberapa desa penyanga TNGGP terlampir)	Optimalisasi FKKP Cagar Biosfer Cibodas dan mendorong desa-desa sekitar kawasan lainnya untuk berkomitmen kepada lingkungan
25. Keuntungan ekonomis	<p>Kawasan konservasi <b>tidak memberikan keuntungan ekonomis secara langsung</b> bagi masyarakat lokal</p> <p><i>Sudah jelas</i></p> <p>Potensi keuntungan ekonomis secara langsung sudah diketahui dan <b>direncanakan untuk direalisasikan</b></p> <p><i>Pemanfaatan wisata alam atau jasa lingkungan</i></p> <p><b>Terdapat aliran keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal</b></p> <p><i>Keuntungan ekonomi pada masyarakat masih bersifat sampingan</i></p> <p>Kawasan konservasi <b>memberikan keuntungan ekonomi utama kepada masyarakat lokal</b></p> <p><i>Sebagai mata pencarian utama masyarakat lokal bergantung pada kegiatan di dalam KK</i></p>	0 1 2 3	0 1 2 3	<p>Masyarakat sekitar TNGGP bermata pencarian utama bergantung pada potensi TNGGP (air untuk pertanian, atraksi alam, dan lain-lain) (Laporan Survei Dampak Pandemi Covid-19 (87,7% masyarakat pelaku wisata mengaku sebagai pekerjaan utama), Laporan Identifikasi Potensi SDA dan Ekonomi Desa Penyanga TNGGP serta laporan monitoring KTH Kemitraan Konservasi terlampir).</p>	Pengaturan dan inovasi pemanfaatan potensi SDA TNGGP

26. Monitoring dan evaluasi	Tidak ada monitoring dan evaluasi di kawasan konservasi	0		<p>Hasil monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan pengelolaan dan sebagian hasil monitoring evaluasi sudah ditindaklanjuti seperti: hasil METT tahun 2017 dan pelaksanaan RPP/ RKT (dokumen evaluasi: LKJ 2020, Statistik 2020, Evaluasi Pegawai Tahun 2021, dan Monev Kegiatan Bina Cinta Alam 2016 terlampir)</p>	<p>Mendorong komitmen mengaplikasikan hasil monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan</p>
	<i>Sudah jelas</i>				
	Terdapat <b>kegiatan monitoring and evaluasi secara ad hoc</b> , tetapi tidak ada strategi dan/atau kumpulan hasil secara regular <i>Monev dilakukan secara insidental</i>	1			
	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang <b>disepakati dan dilaksanakan tetapi hasilnya tidak memberikan umpan balik pada pengelolaan</b> <i>Monev dilaksanakan secara reguler</i>	2	2		
Planning/Process	Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang baik, <b>dilaksanakan dengan baik dan digunakan dalam manajemen adaptif</b> <i>Dilaksanakan secara reguler dan adaptif</i> <i>Kegiatan monitoring &amp; evaluasi misalnya METT, SMART Patrol atau RBM</i>	3			
	<i>Sudah jelas</i>				
	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung <b>tidak memadai</b> untuk tingkat kunjungan saat ini <i>Misal hanya ada papan informasi/papan penunjuk</i>	1			
	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung <b>cukup memadai</b> untuk tingkat kunjungan saat ini tetapi perlu ditingkatkan <i>Terdapat papan informasi, papan petunjuk, gerbang dan ruang informasi</i>	2	2		
27. Fasilitas pengunjung	Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung <b>sangat baik</b> untuk tingkat kunjungan saat ini <i>Fasilitas lengkap (sanitasi, keselamatan, aksesibilitas, informasi, kenyamanan pengunjung)</i>	3		<p>fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung pada umumnya telah memadai pada lokasi-lokasi yang ramai pengunjungnya, namun beberapa lokasi (zona pemanfaatan) belum ada atau belum memadai pembangunan fasilitas dan pelayanan pengunjung (daftar sarana dan prasarana pengunjung terlampir)</p>	<p>1) Pemeliharaan fasilitas pengunjung dan 2) Mengusulkan peningkatan sarana wisata bagi pengunjung dan fasilitas sarana prasarana melalui APBN dan mitra</p>
	<i>KSA tidak wajib mengisi</i>				
Outputs					

28. Operator wisata komersil	<b>Sedikit/tidak ada</b> hubungan antara pengelola kawasan dengan operator wisata yang menggunakan Kawasan Konservasi	0	Sudah terbit izin pemanfaatan jasa wisata (SK Izin Pemanfaatan Jasa dan Sarana Wisata terlampir) Pelaksanaan pemenuhan RKT oleh mitra masih belum optimal	Pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap pemegang izin
	<i>Sudah jelas</i>			
	<b>Terdapat hubungan</b> antara pengelola kawasan dengan operator wisata tetapi <b>sangat terbatas pada urusan administrasi atau peraturan</b>		1	
	<i>Terdapat operator luar</i>			
Process	<b>Terdapat kerjasama terbatas</b> antara pengelola kawasan dengan operator wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi	2	2	
	<i>Terdapat IUPJWA dan IUPSWA</i>			
	<b>Terdapat kerjasama yang baik</b> antara pengelola kawasan dan operator wisata untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi			
	<i>Kerjasama menyangkut penambahan pengalaman/edukasi pengunjung dalam konservasi</i>			
29. Pungutan (PNBP atau pungutan lain)	Meskipun secara teori pungutan diterapkan, tetapi <b>pungutan tersebut tidak dikumpulkan</b>	0	Organisasi sudah mendapat manfaat dari PNBP tahun 2021 sumber dana tentang distribusi PNBP terhadap pengelolaan kawasan dari PNPK sebesar Rp 1.483.000.000,- (PNBP penyumbang PNBP	Perlu didorong regulasi umpan balik tentang pengelolaan kawasan dari PNPK sebesar Rp 1.483.000.000,- (PNBP penyumbang PNBP
	<i>PNBP tidak dipungut di wilayah yang sudah ditetapkan dalam PP No 12/2014</i>			
	<b>Pungutan dikumpulkan, tetapi tidak ada kontribusi</b> pada Kawasan Konservasi atau lingkungan sekitarnya			
	<i>Pungutan hanya PNBP</i>			
Inputs/Process	Pungutan dikumpulkan, dan <b>memberikan sedikit kontribusi</b> pada Kawasan Konservasi dan lingkungan sekitarnya	2	2	Tahun 2020 dan 2021 dan RKAKL 2021 terlampir)
	<i>Ada mekanisme pungutan lain selain PNBP yang berkontribusi kepada kawasan/ lingkungan sekitarnya</i>			
	<b>Pungutan dikumpulkan dan memberikan kontribusi yang substansial</b> untuk KK dan lingkungan sekitarnya			
	<i>Belum ada mekanismenya di Indonesia</i>			

Outcomes	<p><b>30. Kondisi nilai-nilai</b></p> <p>Bagaimana kondisi dari nilai-nilai penting kawasan konservasi bila dibandingkan dengan saat penunjukan kawasan?</p> <p><b>Banyak nilai-nilai</b> keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya yang penting <b>sangat menurun/berkurang</b></p> <p><i>Tujuan pengelolaan pada saat penunjukan sudah punah Misal : Apabila badak jawa di TN Ujung Kulon punah</i></p> <p><b>Beberapa nilai-nilai</b> keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya telah <b>sangat menurun/berkurang</b></p> <p><i>Misal : populasi badak sumatera di TNKS yang telah punah, namun masih ada fitur utama pengelolaan lain yang masih ada (harimau sumatera dll)</i></p> <p><b>Beberapa nilai-nilai</b> keanekaragaman hayati dan ekologis atau budaya sebagian menurun/berkurang tapi nilai-nilai yang paling penting tidak terkena dampak secara signifikan</p> <p><i>Fitur-fitur kawasan berkurang, tetapi fitur utama masih ada</i></p> <p><b>Nilai-nilai</b> keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya <b>relatif utuh</b></p> <p><i>Sudah jelas Data berasal dari hasil monitoring. Mandat kelola utama harus ada datanya. Hasil monitoring bisa oleh mitra atau hasil riset</i></p>	<b>0</b>		Sudah ada data-data hasil monitoring dan riset baik dari internal maupun eksternal yang ditetapkan oleh Kementerian LHK (data satwa prioritas dan hasil inventarisasi dan monitoring keanekaragaman hayati terlampir)	Dilakukan penajaman analisa hasil data untuk kepentingan pengelolaan
		<b>1</b>			
		<b>2</b>			
		<b>3</b>	<b>3</b>		
30a: Kondisi nilai-nilai	Penilaian kondisi nilai-nilai <b>didasarkan pada riset dan/atau monitoring</b> <i>Sudah jelas</i>	<b>1</b>	<b>1</b>	Organisasi telah menerapkan sistem monitoring berdasarkan metodologi ilmiah (juknis monitoring terlampir)	Peningkatan kerjasama dengan lembaga yang mempunyai kapasitas ilmiah
30b: Kondisi nilai-nilai	<b>Program pengelolaan yang spesifik</b> sedang dilakukan untuk menghadapi tekanan terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya <i>Sudah jelas, misal : Program Penangkaran Maleo di SM Bakirang, Banteng di Baluran, Badak di Way Kambas, mantangan di BBS, savana di Alas Purwo.</i>	<b>1</b>	<b>1</b>	Sudah dibangun pusat pendidikan elang jawa, JGC, laporan kegiatan di JGC, dan masterplan pengelolaan owa jawa (terlampir)	Optimalisasi fungsi dari sarana yang sudah ada dengan didukung SDM yang memadai
30c: Kondisi nilai-nilai	Kegiatan untuk menjaga nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya kunci <b>merupakan bagian yang rutin dalam pengelolaan Kawasan Konservasi</b> <i>Sudah jelas, dilakukan secara rutin</i>	<b>1</b>	<b>1</b>	Organisasi sudah memiliki data-data hasil monitoring nilai-nilai keanekaragaman hayati dan ekologis secara rutin	Perlu tindak lanjut hasil monitoring baik ke arah pembinaan habitat maupun pemanfaatan plasma nutfah
<b>TOTAL SCORE</b>		<b>83.00</b>			

Lampiran 4. Lembar Rekomendasi (resume hasil penilaian METT)

**Resume Hasil Penilaian METT**  
**(Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango)**

<b>Nilai</b>		
Skor METT		$\frac{83}{99} \times 100\%$ <b>83,84 %</b>
<b>Penjelasan Nilai</b>		
Konteks	Kekuatan	Status hukum melalui penetapan SK.3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014
100 %	Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Judul SK penetapan perlu direvisi</li> <li>• Lampiran peta penetapan perlu diupdate dan dimasukan dalam pemutakhiran</li> </ul>
	Isu Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa lokasi kawasan perluasan yang belum masuk dalam lampiran SK penetapan No. 3683 /Menhut-VII/ KUH/ 2014</li> <li>• Masih adanya pemanfaatan untuk penggarapan di dalam kawasan</li> </ul>
	Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi UPT dari SK.3863/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang merupakan tahap akhir penetapan kawasan Taman Nasional Gnung Gede pangrango kepada mitra instansi terkait</li> <li>• <i>Ground check</i> serta pemeliharaan jalur dan pal batas kawasan secara rutin</li> </ul>
Perencanaan	Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapatnya Peraturan yang memayungi kawasan</li> <li>• Kawasan TNGGP telah memiliki tujuan untuk Sebagai Perwakilan Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermanfaat untuk Mendukung Habitat Owa Jawa, Macan Tutul, Surili, dan burung dilindungi.</li> <li>• Letak kawasan yang strategis dan menyandang status Cagar Biosfer Cibodas, kawasan strategis nasional (Bopunjur).</li> <li>• Rencana Pengelolaan yang merupakan pedoman pengelolaan.</li> <li>• Terdapat rencana kerja dan banyak kegiatan telah diimplementasikan</li> </ul>
90 %	Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RP dan renstra merupakan pedoman kegiatan, dimana RP mengacu pada mandat untuk pengelolaan kawasan sedangkan Renstra merupakan program untuk mendukung pengelolaan kawasan. Namun demikian untuk Renstra acuan yang dipakai kebutuhan strategis nasional, sehingga program-program yang dialokasi bersifat global/ nasional.</li> <li>• Sudah adanya perencanaan penggunaan lahan dan air yang dimplementasikan dalam RTRW oleh pemerintah daerah, namun belum dikawal dan disinergikan secara optimal dalam implementasinya oleh <i>multistakeholder</i></li> </ul>
	Isu Prioritas	<p>Trend dinamika pengelolaan seperti terbitnya SK 174 tentang perluasan kawasan TNGGP menyebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya areal yang terpisah (exclave) tidak kompak.</li> <li>✓ Adanya <i>enclave</i></li> <li>✓ Adanya areal terbuka di dalam kawasan</li> </ul>
	Rekomendasi	Menyusun perencanaan pengelolaan kawasan dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan yang meliputi kegiatan:

Lampiran 4. Lembar Rekomendasi (resume hasil penilaian METT)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sosialisasi zonasi kepada masyarakat serta pemantauan dan evaluasi implementasi masing-masing zona pengelolaan.</li> <li>Optimalisasi sinergisitas dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan Aparat Penegak Hukum lainnya serta memutus alur tipihut dengan mengedepankan penanganan terhadap aktor intelektual dan pemodal.</li> <li>Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNGGP Periode 2019 - 2028, Renstra TNGGP periode tahun 2020 - 2024, dan Renja BBTNGGP</li> <li>Pembinaan daerah penyanga dalam rangka <i>homorange</i> satwa.</li> <li>Koordinasi dengan BPKH, update data di lapangan, dan mendorong untuk penyempurnaan lampiran SK penetapan.</li> <li>Melaksanakan pengelolaan kawasan TNGGP berdasarkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNGGP Periode 2019 - 2028, Renstra TNGGP periode tahun 2020 - 2024, dan Renja BBTNGGP.</li> <li>Monitoring dan evaluasi capaian RPJPN dan kesesuaian dengan Renstra dan RP.</li> <li>Pengembangan riset dan monev serta memperluas ruang lingkup bidang kerjasama.</li> </ul>
Input	Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya regulasi, dukungan dana, SDM, dan mitra.</li> <li>Adanya sumberdaya alam, habitat, spesies, ekosistem memadai untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.</li> </ul>
72 %	Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem penganggaran kita masih terpaku penganggaran bersifat general belum mencerminkan secara keseluruhan kondisi tapak sehingga ada hal-hal dari prespektif nasional <i>urgent</i> namun di tingkat tapak sebaliknya.</li> <li>Anggaran pengelolaan kawasan belum memadai</li> <li>Kepastian anggaran sudah tersedia dalam RKAKL namun demikian perlu diperhatikan prioritas nasional yang dapat berakibat pada penghematan anggaran</li> <li>Perlu adanya penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK)</li> <li>Perlu untuk pemenuhan staf terlatih dalam mengimplementasikan program pengelolaan kawasan</li> <li>Sarana dan prasarana pengelolaan ada namun beberapa ada yang tidak berfungsi optimal karena rusak atau hilang</li> <li>Kekurangan untuk mengoptimalkan kegiatan (pemenuhan perlengkapan seperti <i>camera trap</i> untuk satu kegiatan inventarisasi/ monitoring yang ideal)</li> </ul>
	Isu Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/ in house training, studi banding, dan <i>on job training</i></li> <li>Penambahan jumlah pegawai disesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh organisasi Balai Besar TNGGP</li> <li>Melakukan inovasi dalam rangka penyelesaian isu prioritas yang dihadapi pengelola</li> </ul>
	Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perlu didorong regulasi umpan balik tentang distribusi</li> </ul> </li> </ul>

Lampiran 4. Lembar Rekomendasi (resume hasil penilaian METT)

		<p>PNBP terhadap kawasan konservasi sebagai penyumbang PNBP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Monitoring secara timeseries dan menambah inventarisasi jenis lainnya terutama flora serta menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan inventarisasi TSL</li> </ul> </li> <li>• Sarana <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penghapusan BMN yang rusak dan hilang serta mengusulkan penggantinya.</li> </ul> </li> <li>• Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Usulan pegawai sesuai sesuai dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK)</li> </ul> </li> <li>• Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Optimalisasi sinergisitas dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan memutus alur tipih dengan mengedepankan penanganan terhadap aktor intelektual dan pemodal</li> <li>✓ Sinkronisasi kebutuhan Diklat di Satker dengan Balai Diklat dan kerjasama dengan LIPI, Litbang, dan Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri dalam peningkatan keahlian staf</li> <li>✓ Meluaskan jejaring kemitraan/ kerjasama dan menciptakan inovasi dengan mitra dalam intensifikasi pengelolaan</li> <li>✓ Optimalisasi kegiatan dengan menggunakan fasilitas yang ada (rapat dan pelatihan daring) serta upaya menciptakan inovasi dengan mitra melalui penyusunan proposal dan intensifikasi kerjasama</li> </ul> </li> </ul>
Proses	Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batas kawasan diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk lokal/ pengguna lahan yang bertetangga dan direkonstruksi. Perlu mengetahui kondisi terkini posisi pal batas.</li> <li>• Adanya sumberdaya alam, landskap, spesies, ekosistem yang bisa dijadikan sebagai daya tarik wisata alam dan pemanfaatan lainnya (riset, sumber plasma nutfah, nilai valuasi, dll.).</li> <li>• Pelaksanaan sistem perlindungan merupakan pondasi yang kuat dalam melakukan pengawalan pengelolaan kawasan.</li> <li>• Hasil riset merupakan literatur yang digunakan untuk melakukan pelaksanaan program pengelolaan dan selama ini telah berjalan dengan baik, banyak data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut belum semuanya merupakan kebutuhan dalam pengelolaan.</li> <li>• Pendidikan dan penyadaran merupakan bagian program yang dilaksanakan di TNGGP.</li> <li>• Telah terbangunnya komitmen dan pemahaman dengan pemerintah dan swasta di sekitar dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi.</li> </ul>
81 %	Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi anggaran sudah tersedia namun belum optimal (masih kurang volume kegiatan).</li> <li>• Pemeliharaan perlengkapan selama ini sudah tersedia namun masih perlu: penambahan volume pemeliharaan dan standarisasi penyimpanan dan pemeliharaan.</li> <li>• Peran serta masyarakat lokal merupakan salah satu untuk</li> </ul>

Lampiran 4. Lembar Rekomendasi (resume hasil penilaian METT)

		<p>memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, selama ini sudah ada namun perlu ditingkatkan dengan memberikan ruang payung yang jelas sehingga sinergi program dari pengelolaan kawasan dengan masyarakat sekitar kawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan program kegiatan, selama ini hasil kegiatannya belum sepenuhnya dijadikan bahan masukan sepenuhnya dalam mengambil kebijakan</li> </ul>
	Isu Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perimbangan komposisi sumber anggaran RM dan PNP</li> <li>Belum optimalnya sarana pendukung pengelolaan</li> <li>Optimalisasi peran masyarakat lokal</li> <li>Optimalisasi dari hasil monitoring dan evaluasi</li> </ul>
	Rekomendasi	<p>Usulan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prioritas penganggaran disesuaikan dengan RP dan Renstra.</li> <li>Pengusulan perimbangan sumber anggaran RM dan PNP.</li> <li>Penambahan penganggaran untuk peningkatan pemeliharaan peralatan (sarana dan prasarana), pendataan, pengusulan serta pengadaan barang-barang pengganti yang sudah rusak dan lewat masa (kadaluarsa) tidak <i>compatible</i>.</li> <li>Menyiapkan SDM terlatih dalam pemeliharaan BMN dan menyiapkan ruang penyimpanan BMN yang memadai.</li> </ul> <p>Program Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu mendorong implementasi pengelolaan kawasan yang melibat masyarakat melalui program Cagar Biosfer Cibodas.</li> <li>Peningkatan sistem secara aplikasi/ <i>online</i>.</li> <li>Inventarisasi dan monitoring sumber daya secara manual, menggunakan aplikasi dan sistem grid.</li> <li>Monitoring TSL yang dilindungi dan ekosistemnya, serta perbaikan habitat.</li> <li>Menciptakan inovasi dengan mitra dan intensifikasi kerjasama.</li> <li>Peningkatan kuantitas kegiatan pendidikan dan penyadaran masyarakat sekitar kawasan, kerjasama dengan mitra dalam program pendidikan dan penyadaran untuk masyarakat sekitar kawasan baik luring maupun daring.</li> <li>Pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap pemegang izin.</li> <li>Monitoring pelaksanaan RKT pemegang izin dan pemegang PKS.</li> <li>Laporan monitoring dan evaluasi dijadikan salah satu acuan dalam menentukan penetapan kebijakan selanjutnya.</li> </ul> <p>Penataan kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dengan BPKH, <i>update</i> data di lapangan, dan mendorong untuk penyempurnaan lampiran SK penetapan.</li> </ul>
Output	Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah ada mitra/ operator wisata komersil baik pemegang IUPJWA dan IUPSWA.</li> </ul>

Lampiran 4. Lembar Rekomendasi (resume hasil penilaian METT)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target PNBP dari tahun ke tahun tercapai.</li> <li>• Keberadaan ruang usaha menjadi salah satu daya tarik investor.</li> </ul>
83 %	Kelemahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak semua ODTWA memiliki sarpras dan petugas pelayanan bagi pengunjung yang memadai.</li> </ul>
	Isu Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu penataan dan peningkatan sarana prasarana ODTWA serta penempatan petugas pelayanan.</li> </ul>
	Rekomendasi	<p>Optimalisasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wisata Alam melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pemeliharaan fasilitas pengunjung hasil dari skema SBSN di 4 lokasi (Mandalawangi, Selabintana, Situgunung, dan Cimungkad).</li> <li>✓ Mengusulkan penataan dan peningkatan sarana wisata serta petugas pelayanan bagi pengunjung melalui APBN, SBSN, dan mitra.</li> </ul>
Outcome	Kekuatan	Kondisi kawasan relatif utuh sebagai perwakilan hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa.
100 %	Kelemahan	Perlu diperhatikan potensi kehati dan ODTWA diminati dan mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi, apabila tidak dilakukan pemantauan dan pemantauan dapat berakibat rusaknya kawasan.
	Isu Prioritas	Pengelolaan kehati dan wisata yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi mutlak untuk dilakukan sehingga keberadaan dan fungsi kawasan dapat terjaga
	Rekomendasi	<p>Pengaturan dan inovasi pemanfaatan potensi SDA TNGGP melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Penajaman analisa hasil data untuk kepentingan pengelolaan kehati dan wisata</li> <li>✓ Keberadaan keanekaragaman hayati di TNGGP dijadikan sebagai bank plasma nutfah dan dapat menunjang wisata alam.</li> </ul>

Penilai (daftar terlampir pada daftar hadir)	Fasilitator
Pengelola Kaw. Konservasi	Dian Risdianto, S.P. M.Si. NIP
Staf Kaw. Konservasi	
Staf Lembaga Kaw. Konservasi. lain	
Lembaga Swasta Masyarakat	
Masyarakat Lokal	
Peneliti/ Perguruan Tinggi	

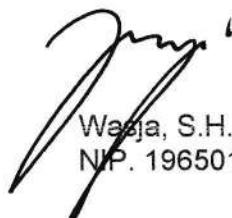
**RENCANA AKSI**  
**PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI**  
**TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2022-2023**

No	Isu	Nilai	Langkah Ke Depan	Waktu
1	Tujuan utama dari kawasan konservasi:  Tujuan sudah ada dalam RP namun pelaksanaannya belum seluruhnya terlaksana karena disesuaikan dengan dinamika pengelolaan	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan Mandat Kawasan, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang TNGGP Periode 2019 - 2028, Renstra TNGGP periode tahun 2020 - 2024, dan Renja BBTNGGP	2022-2023
2	Desain kawasan konservasi:  Bentuk kawasan yang menjadi tidak kompak. Sebagian kawasan berbatasan langsung dengan tanah milik sehingga terdapat kecenderungan fragmentasi habitat satwa liar dan sudah dilakukan revisi zonasi tahun 2020	2	Pembinaan daerah penyangga dalam rangka <i>home range</i> satwa	2022-2023
3	Pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi:  Masih adanya tumpang tindih batas kawasan dengan tanah milik	2	Koordinasi dengan BPKH, update data di lapangan, dan mendorong untuk penyempurnaan lampiran SK penetapan	2022-2023
4	Inventarisasi sumberdaya:  Sudah dilakukan monitoring satwa prioritas, namun belum sepenuhnya rekomendasi hasil monitoring dan inventarisasi TSL ditindaklanjuti	2	Monitoring secara <i>timeseries</i> dan menambah inventarisasi jenis lainnya terutama flora serta menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan inventarisasi TSL	2022-2023
5	Jumlah pegawai:  SDM/ pegawai secara fungsi dan jumlah masih kurang	2	Usulan kebutuhan pegawai sesuai sesuai dengan hasil Analisis Beban Kerja (ABK)	2022-2023
6	Pelatihan Pegawai:  Secara umum staf fungsional sudah terlatih namun keahliannya perlu ditingkatkan dan perlu penambahan jumlah	2	Sinkronisasi kebutuhan Diklat di Satker dengan Balai Diklat dan kerjasama dengan LIPI, Litbang, dan Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri dalam peningkatan keahlian staf	2022-2023
7	Anggaran saat ini:  Anggaran pengelolaan kawasan belum memadai	2	Usulan peningkatan anggaran dan meluaskan jejaring kemitraan/ kerjasama dan menciptakan inovasi dengan mitra dalam intensifikasi pengelolaan	2022-2023
8	Kepastian anggaran:  Kepastian anggaran sudah tersedia dalam RKAKL namun demikian perlu diperhatikan	2	Optimalisasi kegiatan dengan menggunakan fasilitas yang ada (rapat dan pelatihan <i>daring</i> ) serta upaya menciptakan inovasi	2022-2023

No	Isu	Nilai	Langkah Ke Depan	Waktu
	prioritas nasional yang dapat berakibat pada penghematan anggaran		dengan mitra melalui intensifikasi kerjasama	
9	Pengelolaan anggaran:  Sebagian besar penganggaran sudah sesuai dengan prioritas mandat pengelolaan pada RP dan Renstra, namun porsi dukungan anggaran lebih dititikberatkan pada Renstra yang memperhatikan prioritas nasional	2	Prioritas penganggaran disesuaikan dengan Mandat Kawaaan, RP dan Renstra	2022-2023
10	Perlengkapan:  Perlengkapan tersedia namun tidak semuanya berfungsi optimal karena rusak atau hilang	2	Penghapusan BMN yang rusak dan hilang serta mengusulkan penggantinya	2022-2023
11	Pemeliharaan perlengkapan:  Pemeliharaan ada namun hanya terbatas untuk skala prioritas yang penting	2	1) Penambahan penganggaran untuk peningkatan pemeliharaan peralatan (sarana dan prasarana), pendataan, pengusulan serta pengadaan barang-barang pengganti yang sudah rusak dan lewat masa (kadaluarsa) tidak compatible; 2) Menyiapkan SDM terlatih dalam pemeliharaan BMN dan menyiapkan ruang penyimpanan BMN yang memadai	2022-2023
12	Pendidikan dan penyadaran:  Ada program kegiatan pendidikan konservasi lingkungan serta program peningkatan penyadartahuan masyarakat sekitar kawasan, namun masih kurang dalam kuantitas	2	Peningkatan kuantitas kegiatan pendidikan dan penyadartahuan masyarakat sekitar kawasan serta meningkatkan kerjasama dengan mitra dalam program pendidikan dan penyadaran untuk masyarakat sekitar kawasan baik luring maupun daring	2022-2023
13	Monitoring dan evaluasi:  Hasil monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan pengelolaan	2	Mendorong komitmen mengaplikasikan hasil monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan	2022-2023
14	Fasilitas pengunjung:  Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung pada umumnya telah memadai pada lokasi-lokasi yang ramai pengunjungnya, namun beberapa lokasi (zona pemanfaatan) belum ada atau	2	Optimalisasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wisata Alam melalui: 1) Pemeliharaan fasilitas pengunjung hasil dari skema SBSN di 4 lokasi (Mandalawangi, Selabintana, Situgunung, dan Cimungkad).	2022-2023

No	Isu	Nilai	Langkah Ke Depan	Waktu
	belum memadai pembangunan fasilitas dan pelayanan pengunjung		2) Mengusulkan penataan dan peningkatan sarana wisata serta petugas pelayanan bagi pengunjung melalui APBN, SBSN, dan mitra.	
15	Operator wisata komersil:  Pelaksanaan pemenuhan RKT oleh mitra masih belum optimal	2	1) Pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap pemegang izin  2) Monitoring pelaksanaan RKT pemegang izin dan pemegang PKS.	2022-2023
16	Pungutan (PNBP atau pungutan lain):  Distribusi anggaran dari PNBP terhadap kegiatan pengelolaan kawasan konservasi belum berdasarkan perimbangan besar PNBP yang disumbangkan dari kawasan tersebut	2	Perlu didorong regulasi umpan balik tentang distribusi PNBP terhadap kawasan konservasi sebagai penyumbang PNBP	2022-2023

Cibodas, 19 November 2021  
Plt. Kepala Balai Besar,



Wasja, S.H.  
NIP. 196501061998031004

**NOTULENSI**  
**PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI**  
**TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2021**

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 12 November 2021  
Waktu : Pukul 09.00 – 16.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Balai Besar TNGGP  
Pimpinan Rapat: Plt. Kepala Balai Besar TNGGP  
Fasilitator : Dian Risdianto, S.P. M.Si.  
(Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan KPA)  
Notulis : Poppy Oktadiyani, S.Hut. M.Si.  
Agenda : Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi TNGGP  
Metode : FGD secara *offline* dan *online* (*hybrid meeting*)  
Peserta : daftar hadir terlampir

**Uraian Hasil:**

Susunan Acara:

1. Pembukaan
2. Doa
3. Sambutan dari Plt. KBB
4. Paparan dari Fasilitator Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi
5. Diskusi

1. Sambutan dan arahan Plt. Kepala Balai Besar TNGGP diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha\_(lengkapnya\_lihat\_naskah\_sambutan)
  - Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) berdasarkan SK Dirjen KSDAE Nomor: SK. 357/KSDAE-SET/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, Balai Besar TNGGP merupakan kawasan konservasi dengan nilai METT tertinggi kategori taman nasional. Hasil penilaian tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2015 ada peningkatan dari 80 % menjadi 80,81 %.
  - Kami berterimakasih dengan kesediaan bapak/ ibu berpartisipasi dalam mengikuti penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi TNGGP.

- Penilaian pengelolaan saat ini tentu akan mengalami perubahan karena adanya perubahan zonasi hasil review zonasi dan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan.
  - Bapak/ ibu yang sudah melihat langsung ke TNGGP dapat mengetahui potensi yang ada di TNGGP.
  - Antara satu aspek dengan aspek lainnya dalam penilaian ini akan mempengaruhi.
2. Paparan dari Fasilitator Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi
    - Pengertian Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK → bukan untuk menilai pengelola namun proses pengelolaan
    - Kebijakan penilaian
    - Hasil penilaian: 67 ke atas sudah efektif → Rencana Aksi Pengelolaan TN pada umumnya pengelolaan sudah efektif
    - Target dan capaian: Renstra 2015 – 2019 (IKU, IKP, dan IKK)
    - Tata cara penilaian → METT (6 elemen penilaian → 30 indikator), audiens sebagai penilai → persentase nilai indek pengelolaan kawasan konservasi 40% (proses) dan outcome adalah bagaimana KK dapat memberikan nilai ekonomis dan lestari
    - Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KK:  
Bukan dengan penilaian namun dengan melakukan langkah-langkah sesuai rencana aksi yang disusun
  3. Bimbingan Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Lingkup Balai Besar TNGGP.
    - Hasil penilaian METT Balai Besar TNGGP tahun 2021 ada kenaikan yaitu dari 80,81% (tahun 2017) menjadi 83,84%, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Context</i>	: 100%
<i>Planning</i>	: 90%
<i>Input</i>	: 72%
<i>Process</i>	: 81%
<i>Outputs</i>	: 83%
<i>Outcomes</i>	: 100%
- Secara terperinci hasil penilaian dapat dilihat pada matrik penilaian.

4. Diskusi:

No	Isu	Masukan/ Saran/ Tanggapan
1	Ancaman kawasan	Mumuh M. Rozi - Unsur: dalam mengidentifikasi ancaman dapat membentuk kelompok kerja dalam memberikan masukan identifikasi ancaman kawasan
		Kasubag PKS: TNGGP sudah memiliki kerjasama dengan para mitra untuk membantu memberikan masukan identifikasi ancaman
2	Ancaman kawasan: 4.2 Jalur layanan dan jasa	Rama Haribowo - UIN Jakarta: Saat ini lagi ada kegiatan di Resort Tapos, pada point 4) lokasi di LBC pada weekend jalur lumayan padat, apakah akan memberikan ancaman? Banyak digunakan untuk kegiatan masyarakat sekitar, apakah masih dalam batas normal. Namun saat weekend mobilitas kendaraan yang cukup tinggi (akses menuju Kopi Daong)
		Kasubag PKS: Akan dipastikan kembali apakah jalan tersebut berada di dalam/ di luar kawasan? Fokus kepada ancaman nilai penting dari kawasan (TNGGP)
4	Ancaman kawasan: Penggunaan dan ancaman sumberdaya biologis didalam kawasan konservasi: 5.2 Pengumpulan tanaman darat atau produk tanaman (bukan kayu)	Hasan Gunatara - Nikreuh: Ancaman dari campur tangan manusia dari masyarakat dari daerah penyangga (pengambilan tanaman hias), seberapa pengaruh terhadap kawasan?
		Fasilitator dari Dit PKK: pengumpulan produk tanaman ancaman tinggi terjadi sampai ke zona inti, hilangnya jenis, dan menggaggu ekosistem. Sedang jika ancaman tidak mencapai zona inti namun dampak substansial pada ekosistem dan jenis dilindungi, rendah terjadi namun intensitas rendah dapat dikendalikan dan tidak bedampak terhadap nilai penting kawasan
5	Ancaman kawasan: Masalah spesies atau gen invasive dan bermasalah: 8.1b Patogen (non-native atau native tetapi menimbulkan masalah baru/meningkat	Anton Ario - CI: Ancaman akan menjadi potensial 1) Adanya Canine Distemper Virus/ CDV dari anjing liar yang dimakan macan tutul, 2) Kematian masal babi hutan impact nya kurangnya mangsa dan macan tutul akan ke luar kawasan --> berdampak pada masyarakat
		Sofian Iskandar -UNB: konflik macan tutul sebagai satwa prioritas dengan manusia, berpotensi mempercepat penularan untuk

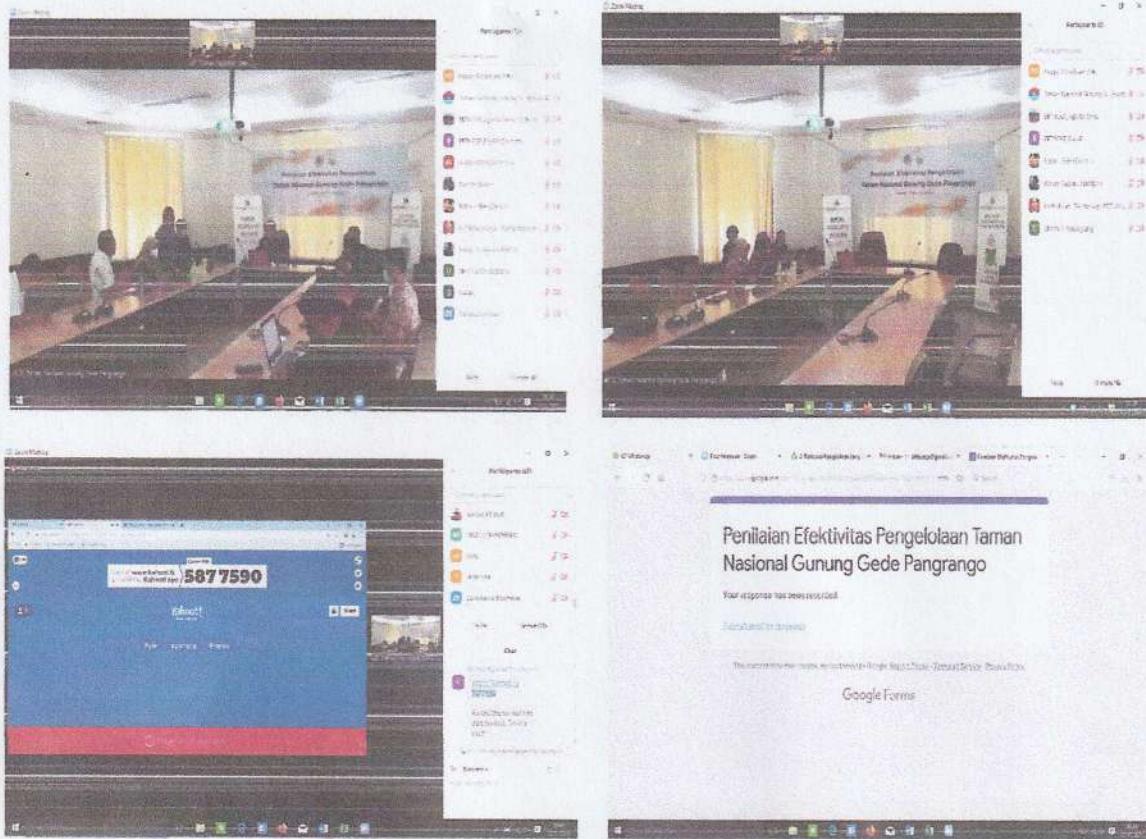
No	Isu	Masukan/ Saran/ Tanggapan
		mencari sumber pakan lain di lingkungan masyarakat --> koordinasi/ konsultasi dengan Dinas Peternakan 3 Kabupaten, agar dapat terdeteksi dini kemungkinan penyebarannya
		drh. Pristi - JGC: informasi untuk penularan Canine Distemper Virus/ CDV, utamanya adalah melalui Udara (air borne) dan selain itu bisa melalui air atau makanan yang tercemar virus dari satwa yang terinfeksi. Misalnya saja anjing pemburu yang terinfeksi minum pada sumber air di dalam KK. Hal ini tentunya jika terjadi kasus, proses spreading-nya bisa terjadi dengan cepat.
6	Ancaman kawasan: Polusi yang masuk atau muncul didalam kawasan konservasi: 9.2 Limbah dan buangan industry, pertambangan dan militer	Asep Suganda - Karest Situgunung: Akan mengadakan pelatihan gerilya apakah ini masuk kategori gangguan? Namun tidak ada limbah, hanya lintas medan dan pengenalan gunung dan lembah
		Fasilitator dari Dit. PKK: Hanya diperbolehkan pelatihan jungle survival dan pada zona tertentu
7	Jumlah pegawai	Mumuh M. Rozi - Unsur: jumlah pegawai sangat terbatas dengan luasan cukup luas, kepanjangan petugas adalah mitra-mitra yang ikut bagian dalam pengelolaan kawasan melalui Surat Keputusan ataupun Surat Tugas dari BBTNGGP
		Kasubag PKS: Kegiatan patroli bersama MMP, MPA, dan kelompok masyarakat sekitar kawasan
8	Perlengkapan	Mumuh M Rozi - Unsur: perlu ada kontrol di lapangan terkait penggunaan perlengkapan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Apakah ada alat deteksi barang bawaan oleh pengunjung (xray)
		Kasubag PKS: Hasil penghapusan BMN tahun 2021 ada 2 kali sebanyak 1.528 unit peralatan dan mesin (sudah rusak dan layak dihapus) dan 84 unit bangunan dihapuskan karena rusak). Xray TNGGP belum punya, sempat kami ajukan dalam anggran DIPA namun tidak lolos
		Kabidtek: kamera trap jumlah terbatas sehingga tidak bisa digunakan secara bersamaan (saat ini masih digunakan secara bergiliran), kendaraan roda 4 terbatas untuk kegiatan patroli, drone masih terbatas

No	Isu	Masukan/ Saran/ Tanggapan
9	Pemeliharaan perlengkapan	Mumuh MR - Unsur: perlengkapan dan peralatan yang digunakan, pos-pos keamanan perlu/ tidak, sarana prasarana untuk pemaantauan agar terkecukupan kebutuhan dari hulu - hilir. Pemeliharaan perlengkapan dan peralatan harus ada.
		Kabidtek: jembatan masih ada yang rusak, kondisi kantor resort ada beberapa yang rusak
10	Pendidikan dan penyadaran	Kasubag PKS: program penyadartahuan ada namun untuk tahun ini kena penghematan
		Kabidtek: walaupun ada penghapusan, namun program penyadartahuan tetap kami laksanakan dengan kegiatan-kegiatan mandiri para fungsional dan tamu-tamu kunjungan ke TNGGP
11	Perencanaan penggunaan lahan dan air	Kabidtek: saat pemda membangun jalan sangat memperhatikan keberadaan kawasan TNGGP dengan adanya koordinasi
12	Pemerintah dan swasta di sekitar	Kepala Subag PKS: GEDEPAHALA merupakan forum penggiat konservasi dari para pengelola TNGGP dan TNGHS (yang masih aktif maupun yang sudah pensiun) serta beberapa NGO
		Fasilitator dari Dit. PKK: Suatu forum yang mendukung untuk pengelolaan TNGGP
13	Masyarakat lokal	Fasilitator dari Dit. PKK: sudah banyak forum dan pengaduan-masukan dari masyarakat dapat dengan mudah dilakukan
		Kabid III Bogor: 22 pemegang izin pemanfaat air di Bidang PTN Wilayah III Bogor dalam bentuk "Mitra Pengguna Air"
14	Keuntungan ekonomis	Fasilitator dari Dit. PPK: tambahkan resume dari hasil laporan survey dampak pandemi
15	Monitoring dan evaluasi	Fasilitator dari Dit. PKK: Hasil dari monev ditindaklanjuti
		Kasubag PKS: Misal survey kepuasan pengunjung → saran dari pengunjung untuk aspek kebersihan pengelolaan sampah dan fasilitas di jalur pendakian masih kurang dan pengelola belum bisa mengadakan fasilitas tersebut
16	Fasilitas pengunjung	Kabid III Bogor: Fasilitas di Bidang III Bogor masih belum memadai sehingga nilai (1)
		Kasubag PKS: nilai (2) ini secara umum di TNGGP

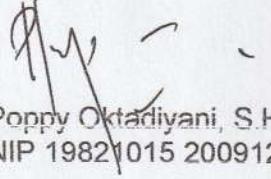
No	Isu	Masukan/ Saran/ Tanggapan
17	Kondisi nilai-nilai	Fasilitator Dit. PKK: Resume data penjelasan dapat justifikasi nilai 3 (trant hasil monit satwa stabil) & tutupan lahan masih baik
		Latifah - CI: kegiatan monitoring macan tutul dalam melaksanakan RKT

Dokumentasi kegiatan:

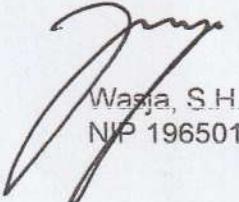




Notulis,

  
 Poppy Oktadiyani, S.Hut, M.Si.  
 NIP 19821015 200912 1 003

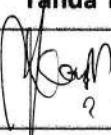
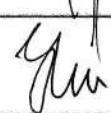
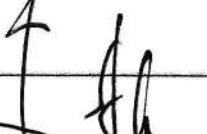
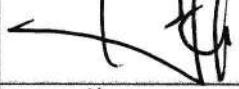
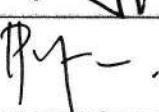
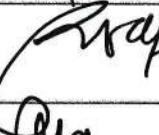
Mengetahui  
 Plt. Kepala Balai Besar,

  
 Wajia, S.H.  
 NIP 196501061998031004

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Jum'at/ 12 November 2021

Agenda : Penilaian Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021

No.	Nama	Asal Instansi/ Jabatan	Tanda Tangan
1	Bulan D	BBTNGGP	
2	Yuni J, P	BBTNGGP	
3	Adiwi	BBTNGGP	
4	REZA	BBTNGGP	
5	Aganta Sora	PKS	
6	Dian Recalwan	Dik- PKK	
7	Poppy Oktadiyani	BBTNGGP / PK	
8	Ridwan	Dit. PKK	
9	Sisca Widya A	BBTNGGP / PK EULAP	
10	Agus Oeni	BBTNGGP / EULAP	
11	Andriyanto S	BBTNGGP / PTII	
12			
13			
14			
15			
16			

Lampiran 8. Daftar hadir peserta secara virtual melalui Zoom

No.	Timestamp	Nama Lengkap	Alamat	Jenis Kelamin	Instansi/Organisasi	Jabatan	No. Handphone	E-mail
1	2021/11/12 8:45:06 AM GMT+7	AMRU IKHWANSYAH	Jl. Goal Para No. 35 Kabupaten Sukabumi	Laki-Laki	TNGGP	KSPTN V Bodogol	085238759610	amruikhwansyah@gmail.com
2	2021/11/12 8:46:53 AM GMT+7	Hasanundin#	Kp. Barugeulis desa pasirdatar indah kec. Caringin (resort ptn cimungkad)	Laki-Laki	Volunteer NIKREUH	Wakil ketua	083815832932	Hasanguntara912@gmail.com
3	2021/11/12 8:47:04 AM GMT+7	Dadang Suryana	Bidang PTN Wilayah III	Laki-Laki	Balai Besar TNGGP	Kepala Bidang PTN Wilayah III	08123688453	dasuryana2@gmail.com
4	2021/11/12 8:47:30 AM GMT+7	Fabianus Kartono Redi Susanto, SP.#	Gg. Wargasari No. 10 Cianjur 43212	Laki-Laki	CDKW IV Dinas Kehutanan Prov. Jabar	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	081322698147	caritas_fabie@yahoo.co.id
5	2021/11/12 8:48:42 AM GMT+7	Deddy Wara Susandi, M.Pd.	Jln. Raya Perintis Kemerdekaan, Caringin, Kecamatan Labuan, Kab. Pandeglang, Banten	Laki-Laki	SMK Negeri 3 Pandeglang	Kepala Sekolah	087772227487	deddywarasandi@yahoo.com
6	2021/11/12 8:49:25 AM GMT+7	Poppy Oktadiyani*	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Perempuan	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Penyuluh Kehutanan	081352874249	okta.pop@gmail.com
7	2021/11/12 8:49:50 AM GMT+7	Dinda Rama Haribowo	Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Laki-Laki	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Kordinator Bidang IPA dan Agri - Pusat Laboratorium Terpadu	081318103813	dindarama.haribowo@uinjkt.ac.id
8	2021/11/12 8:54:08 AM GMT+7	Wasja	BBTNGGP	Laki-Laki	BBTNGGP	Plt. KBBTNGGP	085820262477	Jaja.ahyati@gmail.com
9	2021/11/12 9:02:27 AM GMT+7	Didik Prasetyo	Jakarta	Laki-Laki	Fakultas Biologi, Universitas Nasional	Dosen	081387060811	didik@primata.or.id
10	2021/11/12 9:02:40 AM GMT+7	Bambang Mulyawan	Perum Bantar Jati Bogor	Laki-Laki	Balai Besar BBTNGGP	Kepala Seksi PTN Wilayah VI	087721323353	bamb.mulyawan@gmail.com
11	2021/11/12 9:03:42 AM GMT+7	Asep muhtar imron	Kp. Caringin lebak Rt 07/ 04 Desa caringin kulon kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi	Laki-Laki	KONCI	Ketua	085721433611	iasepmuhtar@gmail.com
12	2021/11/12 9:05:56 AM GMT+7	Hilman Nuralim	Gekbrong	Laki-Laki	Volunteer Satapak Rimba	Ketua	087782789942	nuralimhilman475@gmail.com
13	2021/11/12 9:06:52 AM GMT+7	Ardian Khairiah, M.Si	Jakarta	Perempuan	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Dosen Biologi	082112066890	ardian.khairiah@uinjkt.ac.id
14	2021/11/12 9:08:25 AM GMT+7	Rita Istiana	Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Pakuan	Perempuan	Universitas Pakuan	Ketua Program Studi	081281020020	rita_istiana@unpak.ac.id
15	2021/11/12 9:08:38 AM GMT+7	Hasanudin#	Kp.barugeulis pasir datar indah kec caringin kab.sukabumi	Laki-Laki	Volunteer Nikreuh	Wakil ketua	083815832932	Hasanguntara912@gmail.com

Keterangan: \* = juga mengisi Daftar Hadir Peserta secara faktual

# = dua kali mengisi daftar hadir virtual

Lampiran 8. Daftar hadir peserta secara virtual melalui Zoom

No.	Timestamp	Nama Lengkap	Alamat	Jenis Kelamin	Instansi/Organisasi	Jabatan	No. Handphone	E-mail
16	2021/11/12 9:08:56 AM GMT+7	Wita Puspita Ningrum	Cianjur	Perempuan	Balai Besar TNGGP	Penyuluh Kehutanan	081392468384	witaningrum84@gmail.com
17	2021/11/12 9:09:04 AM GMT+7	Johanes Wiharisno	BBTNGGP	Laki-Laki	BBTNGGP	Kasi Wil II Gedeh	081340448007	wiharisno@gmail.com
18	2021/11/12 9:09:06 AM GMT+7	Agus Deni*	Sukabumi	Laki-Laki	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Pengendali Ekosistem Hutan	085720166166	agusdenie@gmail.com
19	2021/11/12 9:09:19 AM GMT+7	FITRA PIRMANSAH	CIANJUR	Laki-Laki	Balai Besar TNGGP	Polhut Pelaksana Lanjutan	082129865556	fitrapirmansah@gmail.com
20	2021/11/12 9:09:37 AM GMT+7	Darwin	Kantor Balai Besar TNGGP Cibodas	Laki-Laki	Balai Besar TN. Gn. Gede Pangrango	Kepala Seksi	081251773535	drwnbhr@gmail.com
21	2021/11/12 9:09:54 AM GMT+7	Rifki Risma Munandar, M.Pd.	Jl. Kebon pedes Pacilong Ujung, kec. kebon pedes kec. Tanah sareal, Kota Bogor	Laki-Laki	Universitas Pakuan	Dosen	085770642737	rifki.munandar@unpak.ac.id
22	2021/11/12 9:09:59 AM GMT+7	Achmad Zaini Takbit	Pasukan Rt 02 Re 011 Cipendawa Pacet Cianjur	Laki-Laki	Sukarelawan Montana	Ketua	081992167239	zainitakbir@gmail.com
23	2021/11/12 9:10:07 AM GMT+7	Ranto	Resort Tegallega Cianjur	Laki-Laki	Balai Besar TNGGP	PEH Muda	087720266733	ranto.mb@gmail.com
24	2021/11/12 9:10:33 AM GMT+7	Andriyatno Sofiyudin, S.Hut.*	Cibodas	Laki-Laki	Balai Besar TN Gede Pangrango	Pengendali Ekosistem Ahli Muda	081385319991	andriys.smi@gmail.com
25	2021/11/12 9:11:49 AM GMT+7	Luki Turniajaya	Villa Ciomas Indah Blok H4 no.5 Rt 5 Rw 14 Ciomas Rahayu kab. Bogor	Laki-Laki	BBTNGGP	Kepala Seksi PTN IV Situgunung	085 882 900 033	turniajaya@gmail.com
26	2021/11/12 9:12:14 AM GMT+7	Arie Yanuar, S.Hut	Cianjur	Laki-Laki	BBTNGGP	Penyuluh Kehutanan Muda	085720222421	arieare22@gmail.com
27	2021/11/12 9:12:24 AM GMT+7	Mohamad Arif Junaidi#	Cibodas	Laki-Laki	BBTNGGP	Polhut Muda	08174948459	arjuna.pangrango@gmail.com
28	2021/11/12 9:12:46 AM GMT+7	Sahrul munir	Cibodas cimacan ciapanas cianjur	Laki-Laki	BBTNGGP	Polhut mahir	087820266669	munirsyahrul69@gmail.com
29	2021/11/12 9:12:53 AM GMT+7	Anton Ario	Lido-Bogor	Laki-Laki	Conservation International Indonesia	Senior Manager Terrestrial Program	08129363308	aario@conservation.org
30	2021/11/12 9:13:09 AM GMT+7	TITI PURWANINGSIH, SH	PONDOK HALIMUN SELABINTANA SUKABUMI	Perempuan	PT. BUMI PASEBAN ALAMI	DIREKTUR	081297441812	purwaningsihtiti@gamil.com

Keterangan: \* = juga mengisi Daftar Hadir Peserta secara faktual

# = dua kali mengisi daftar hadir virtual

Lampiran 8. Daftar hadir peserta secara virtual melalui Zoom

No.	Timestamp	Nama Lengkap	Alamat	Jenis Kelamin	Instansi/Organisasi	Jabatan	No. Handphone	E-mail
31	2021/11/12 9:13:29 AM GMT+7	WILLY ARLAN	PERUM GADING KENCANA ASRI BLOK B7 NO 1 RT 07 RW 15 KEL. SRIWIDARI SUKABUMI	Laki-Laki	VOLUNTEER PANTHERA	WAKIL KETUA	081572505664/ 081298661112	lyke_99@yahoo.com
32	2021/11/12 9:13:39 AM GMT+7	Ridwan*	Jakarta	Laki-Laki	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Staf	08153272614	aired343@gmail.com
33	2021/11/12 9:13:57 AM GMT+7	Agus Pambudi Dharma, S.Pd.,M.Si#	Jl. Peta Barat RT 05/07 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Laki-Laki	Pendidikan Biologi UHAMKA	Dosen	081212758183	agus.pambudi@uhamka.ac.id
34	2021/11/12 9:15:40 AM GMT+7	Asep Hasbilah	Cianjur	Laki-Laki	Resort PTN Gn Putri, Bidwil I Cianjur	PEH Muda	081266108151	hasbilah1982@gmail.com
35	2021/11/12 9:16:12 AM GMT+7	Dr. Ana Widiana, M.Si	Jl. Melati No.23, RT. 02, RW. 21, Kel. Margasari, Kec. Buah Batu. Bandung 40286	Perempuan	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Ketua Jurusan Biologi	0628122132453	anawidiana@uinsgd.ac.id
36	2021/11/12 9:17:30 AM GMT+7	Uus	Jln Prana Cisarua, Cikole kota SukabumiB	Laki-Laki	BBTNGGP	Pengolah data	081282803556	Uusbidang2@gmail.com
37	2021/11/12 9:18:27 AM GMT+7	Ratih Mayangsari	Bogor	Perempuan	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Penyuluh Kehutanan Muda	085692383562	mayang.sari0801@gmail.com
38	2021/11/12 9:20:05 AM GMT+7	Yandi Wijaksana	BBTNGGP	Laki-Laki	BBTNGGP	PEH PERTAMA	085295454907	yandi.bbtnggp@gmail.com
39	2021/11/12 9:22:03 AM GMT+7	Rosadi	Bali Resort Bogor, Cluster Jimbaran Blok JB06 Bogor	Laki-Laki	Universitas Pakuan	Kaprodi Manajemen Lingkungan	081281639705	rosadi@unpak.ac.id
40	2021/11/12 9:22:41 AM GMT+7	Ayi Rustiadi	Resort PTN Cisarua BBTNGGP	Laki-Laki	Balai Besar TNGGP	PEH Muda	08567209209	ayi.rustiadi@gmail.com
41	2021/11/12 9:24:47 AM GMT+7	Ade Frima Nurcahyah Intan	Jl. Cikaret Alfalah RT. 003/RW.10 No. 37 Harapan Jaya Cibinong Kabupaten Bogor	Perempuan	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Polhut Mahir	085694393636	mamacicha@gmail.com
42	2021/11/12 9:29:22 AM GMT+7	Sisca Widiya Afiyanti, S.Hut.*	Cianjur	Perempuan	BBTNGGP	Penyuluh Kehutanan	08113993328	sisca.widiya@gmail.com
43	2021/11/12 9:29:47 AM GMT+7	MOHAMAD ARIF JUNAIDI#	Cibodas	Laki-Laki	BBTNGGP	Polhut Muda	08174948459	arjuna.pangrango@gmail.com
44	2021/11/12 9:30:03 AM GMT+7	Deni Pratama	Jalan raya siliwangi. Kampung kongsi Rt 03/05. kecamatan cicurug kabupaten Sukabumi	Laki-Laki	Volunteer Panthera	Dewan Pengurus	081213728690	denipratama2211@gmail.com
45	2021/11/12 9:31:26 AM GMT+7	Agus Pambudi Dharma, S.Pd.,M.Si#	Jl. Peta Barat RT 05/07 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat	Laki-Laki	Pendidikan Biologi UHAMKA	Dosen	081212758183	agus.pambudi@uhamka.ac.id

Keterangan: \* = juga mengisi Daftar Hadir Peserta secara faktual

# = dua kali mengisi daftar hadir virtual

Lampiran 8. Daftar hadir peserta secara virtual melalui Zoom

No.	Timestamp	Nama Lengkap	Alamat	Jenis Kelamin	Instansi/Organisasi	Jabatan	No. Handphone	E-mail
46	2021/11/12 9:31:54 AM GMT+7	Agung Gunawan	Bogor	Laki-Laki	BB TN Gunung Gede Pangrango	PEH Muda	085213269505	agung.gunawan72@gmail.com
47	2021/11/12 9:33:20 AM GMT+7	V.Diah Qurani	perum Taman Kenari blok A5-15 Ciluar Bogor	Perempuan	Balai Besar TNGGP	kabid wilayah I Cianjur	081282721024	diahqk@yahoo.com
48	2021/11/12 9:34:12 AM GMT+7	Dr. Insan Kurnia, S.Hut., M.Si	Jl Kumbang No 14 Kota Bogor	Laki-Laki	Program Studi Ekowisata, Sekolah Vokasi IPB	Sekretaris Program Studi	08568438275	insankurnia@apps.ipb.ac.id
49	2021/11/12 9:36:16 AM GMT+7	Ika Novianti, A. Md	Sukabumi	Perempuan	BBTNGGP	PEH	081572432805	ikamoets@gmail.com
50	2021/11/12 9:41:35 AM GMT+7	Sofian Iskandar	Kompleks Depdikbud No 13. Jl. Abdul Gani Rt.007/01. Ciputat Timur 15412	Laki-Laki	Fakultas Kehutanan, Univ. Nusa Bangsa	Dosen	08159440659	sofianiskandar@yahoo.com
51	2021/11/12 9:45:36 AM GMT+7	Iip Latifah Syaepullah	Komplek Taman Rekreasi Lido, KM.21 Cigombong-Bogor	Perempuan	Conservation International Indonesia	West Java Field Coordinator	081380813508	lsyaepulloh@conservation.org
52	2021/11/12 9:45:54 AM GMT+7	Ida Rohaida	RPTN Pasir Hantap	Laki-Laki	BBTNGGP	Kanit 2 Polhut	08569818080	idar.gp@gmail.com
53	2021/11/12 9:46:37 AM GMT+7	Wildan Citra Pratama, S.Hut	Komp. Griya Bandung Asri Blok C-70 RT 03 RW 13 Bojongoang Kab Bandung	Laki-Laki	PT. Bumi Wisata Edelweis	Staf Perencanaan dan Pengembangan Usaha Wisata Alam	081312110694	wcitrapratama@yahoo.com
54	2021/11/12 9:46:57 AM GMT+7	Pristiani Nurantika	Bogor	Perempuan	Yayasan Owa Jawa	Dokter hewan JGC	08121803039	Pristi@owajawa.or.id
55	2021/11/12 9:47:27 AM GMT+7	Ika Rosmalasari	Cianjur	Perempuan	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Kepala sub bagian umum	081563853812	ikarosmalasari@gmail.com
56	2021/11/12 9:47:31 AM GMT+7	Asep Suganda	Cigombong Bogor	Laki-Laki	Balai Besar TN. Gunung Gede Pangrango	Polisi Kehutanan Penyelia /Kepala Resort Situgunung	087871413893	asepsuganda995@gmail.com
57	2021/11/12 9:48:56 AM GMT+7	Dadang Rosadi	Resort Tegalega	Laki-Laki	BBTNGGP	Pengolah data	082316279809	dadangrosadi.peg@gmail.com
58	2021/11/12 9:49:03 AM GMT+7	Ali Mulyanto	TNGGP	Laki-Laki	Balai Besar TNGGP	PEH Ahli Muda	08567484482	alemulyant@gmail.com
59	2021/11/12 9:51:14 AM GMT+7	DR. H. Dedi Mulyadi SH., MH.	Jl. Pasir Gede Raya Kampus FH Unsur Cianjur	Laki-Laki	FAKULTAS HUKUM UNSUR	WD-1	083817032154	dedimulyadi53@gmail.com
60	2021/11/12 9:53:56 AM GMT+7	Maria Kurnia Nugrahani S.Hut.	RESORT PTN Bodogol	Perempuan	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Penyuluh Kehutanan Pertama	081392905575	mariannugrahani@gmail.com

Keterangan: \* = juga mengisi Daftar Hadir Peserta secara faktual

# = dua kali mengisi daftar hadir virtual

Lampiran 8. Daftar hadir peserta secara virtual melalui Zoom

No.	Timestamp	Nama Lengkap	Alamat	Jenis Kelamin	Instansi/Organisasi	Jabatan	No. Handphone	E-mail
61	2021/11/12 10:49:26 AM GMT+7	Irvan Maulana	Pondok Cidahu permai blok H1 no 15 Parung kuda sukabumi	Laki-Laki	Volunteer eagle	Anggota	0818419200	irvanmaulana02@gmail.com
62	2021/11/12 10:50:33 AM GMT+7	Fabianus Kartono Redi Susanto, SP.#	Gg. Wargasari No. 10 Cianjur 43212	Laki-Laki	CDKW IV Dinas Kehutanan Prov. Jabar	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	081322698147	caritas_fabie@yahoo.co.id
63	2021/11/12 10:53:21 AM GMT+7	Supian	Kp. Babakan Kencana (Bodogol) RT 005 RW 006 Desa Benda Kecamatan Cicurug. Kabupaten Sukabumi. 43359	Laki-Laki	Tepala	Anggota	081388485003	igud.supian83@gmail.com
64	2021/11/12 10:56:47 AM GMT+7	Anggy racasiwi lionatha	Kp cimacan cipanas cianjur	Laki-Laki	Volunteer GPO	Ketua umum	081413222270	raca.lionatha@gmail.com
65	2021/11/12 10:59:19 AM GMT+7	Dr. Fathorrahman. M.Si	Jl. Adi Sucipto Yogyakarta	Laki-Laki	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga	wakil dekan 3	08179407315	fathorrahman"@uin-suka.ac.id
66	2021/11/12 10:59:38 AM GMT+7	Dwi Prasetyo	Pancawati - Caringin - Bogor	Laki-Laki	PT.Santa Monica Indonesia	Direktur Operasional	0818494137	prassdwiprass@gmail.com
67	2021/11/12 11:04:05 AM GMT+7	Igud Supian	Kp. Babakan Kencana RT 005 RW 006 Desa Benda. Kecamatan Cicurug. Kabupaten Sukabumi. 43359	Laki-Laki	Tepala	Anggota	081388485003	igud.supian83@gmail.com
68	2021/11/12 11:04:30 AM GMT+7	Drs. Kisworo, M.Sc.	Fakultas Bioteknologi UKDW Yogyakarta	Laki-Laki	Fakultas Bioteknologi UKDW	Dekan	082237677965	kisworo@yahoo.com
69	2021/11/12 11:25:48 AM GMT+7	mumuh m rozi	UNSUR Cianjur	Laki-Laki	UNSUR CIANJUR	KABIRO HUMAS	081912210280	rozimumuh06@gmail.com

Keterangan: \* = juga mengisi Daftar Hadir Peserta secara faktual

# = dua kali mengisi daftar hadir virtual



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**  
Jalan Raya Cibodas PO BOX 3 Sdl Tlp/Fax (0263) 512776/519413  
e-mail : [info@gedepangrango.org](mailto:info@gedepangrango.org) website : [www.gedepangrango.org](http://www.gedepangrango.org)

11 November 2021

Nomor : UN.1630/BBTNGGP/TU.3/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi  
Tahun 2021

Yth.  
(Terlampir)  
di  
Tempat

Dalam rangka Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021, kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk dapat hadir pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 12 November 2021  
Jam : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Balai Besar TNGGP  
Agenda : Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi  
Tahun 2021  
Meeting ID : 839 5856 3821  
Passcode : 702095

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan hadir tepat waktu.

Plt. Kepala Balai Besar,

Wasja, S.H.

NIP. 19650106 199803 1 004



LAMPIRAN SURAT UNDANGAN  
Nomor : UN.1630/BBTNGGP/TU.3/11/2021  
Tanggal : 04 November 2021

### DAFTAR UNDANGAN

I	Daftar Undangan Tatap Muka
1	Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi
2	Kepala Balai Besar
3	Kepala Bagian Tata Usaha
4	Kepala Bidang Teknis Konservasi
5	Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan
6	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
7	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
8	Kepala Sub Bagian Program dan Kerja Sama
9	Kepala Sub Bagian Umum
10	Kepala Satuan Tugas POLHUT
11	Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan BBTNGGP
12	Koordinator Penyuluh Kehutanan BBTNGGP
13	Andriyatno Sofiyudin, S.Hut. (PEH Muda pada Sub Bagian Umum)
14	Agus Deni (Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pada Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan)
II	Daftar Undangan Melalui Aplikasi Zoom
A.	Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
15	Kepala Bidang PTN Wilayah I Cianjur
16	Kepala Bidang PTN Wilayah II Sukabumi
17	Kepala Bidang PTN Wilayah III Bogor
18	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I
19	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II
20	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III
21	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV
22	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V
23	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI
24	Kepala Resort Lingkup Balai Besar TNGGP
25	Kepala Satuan Unit POLHUT pada Bidang Wilayah Lingkup Balai Besar TNGGP
26	Koordinator Fungsional PEH pada Bidang Wilayah Lingkup Balai Besar TNGGP
27	Koordinator Fungsional Penyuluh pada Bidang Wilayah Lingkup Balai Besar TNGGP
B	Pemerintah Daerah
28	Kepala BAPPEDA Kabupaten Cianjur
29	Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukabumi
30	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bogor
31	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Jawa Barat (Cianjur)
32	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III Jawa Barat (Sukabumi)
33	Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Jawa Barat (Bogor)
34	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Cianjur
35	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi
36	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor
C	Lembaga Pendidikan
37	Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB
38	Dekan Sekolah Pascasarjana IPB
39	Dekan Fakultas Kehutanan UNB
40	Dekan Fakultas Biologi Universitas Nasional
41	Dekan Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

42	Dekan Fakultas Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
43	Dekan Ilmu Administrasi Publik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi
44	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan
45	Dekan Fakultas MIPA Universitas Pakuan
46	Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pakuan
47	Dekan Fakultas Hukum Universitas Suryakancana
48	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
49	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung
50	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta
51	Kepala SMKN 3 Pandeglang
<b>D</b>	<b>Pemegang IUPSWA/ IUPJWA</b>
52	Direktur P.T. Fontis Aqua Vivam
53	Direktur P.T. Bumi Paseban Alami
54	Direktur P.T. Bumi Wisata Edelweis
55	Direktur P.T. Cibodas Puncak Nirwana
56	Direktur P.T. Santa Monica Indonesia
57	Direktur P.T. Eigerindo Multi Produk Industri
58	Direktur P.T. Indo Othaim Internasional
59	Direktur C.V. Alengka
60	Direktur C.V. Wisata Cibodas
61	KPRI Edelweis
62	Koperasi Suryakencana Mandiri
63	Koperasi Cantigi Wisata Sejahtera
<b>E</b>	<b>Volunteer dan Mitra Lainnya</b>
64	Senior Manager Terrestrial Program CI - Indonesia
65	Coordinator Project ITTO PD 777/15 Rev.3 (F)
66	Ketua Pengurus Yayasan Owa Jawa
67	Ketua Montana
68	Ketua Gede Pangrango Operation
69	Ketua Ever Green
70	Ketua PAL
71	Ketua Panthera
72	Ketua Konci
73	Ketua Nikreh
74	Ketua Cantigi
75	Ketua Tepala
76	Ketua Eagle
77	Ketua Setapak Rimba



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI**

**SURAT TUGAS**

Nomor: ST.333/KK/PPKK1/KSA.1/11/2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, telah ditunjuk pejabat pelaksana kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut;  
b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan Surat Tugas kepada pejabat pelaksana.

Dasar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 15 Tahun 2021, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  
2. Surat Pengesahan DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal KSDAE Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-029.05.1.465011/2021 tanggal 23 November 2020;  
3. Surat Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Nomor: UN.1630/BBTNGGP/TU.3/11/2021 perihal Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2021.

**DIREKTUR PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI**

**MEMBERI TUGAS**

Kepada 1. Nama/Jabatan : Dian Risdianto, S.P.,M.Si/ Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam  
2. Nama/Jabatan : Ridwan/ Pengolah Data

Untuk : Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Cibodas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Dengan Ketentuan : 1. Waktu pelaksanaan tugas adalah selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 11-12 November 2021;  
2. Biaya kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun Anggaran 2021.  
3. Membuat laporan mengenai hasil-hasil pelaksanaan tugas tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tiba;  
4. Untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian untuk dilaksanakan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Tanggal : 5 November 2021



Tembusan:  
Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**  
Jalan Raya Cibodas PO BOX 3 Sdl Tlp/Fax (0263) 512776/519413  
e-mail : [info@gedepangrango.org](mailto:info@gedepangrango.org) website : [www.gedepangrango.org](http://www.gedepangrango.org)

19 Oktober 2021

Nomor : UN.1543 /BBTNGGP/TU.3/10/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Persiapan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi  
Tahun 2021

Yth.  
(Terampir)  
di  
Tempat

Dalam rangka persiapan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021, kami mengundang Tim Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Balai Besar TNGGP Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: SK. 498/BBTNGGP/TU.3/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021, pejabat struktural eselon III dan IV lingkup BBTNGGP, serta penanggung jawab penyusun dokumen untuk dapat hadir pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Oktober 2021  
Jam : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Balai Besar TNGGP  
Agenda : Persiapan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi  
Tahun 2021

Untuk pejabat struktural eselon III dan IV lingkup TNGGP dan pegawai di Bidang PTN Wilayah, dapat mengikuti rapat melalui Aplikasi Zoom:

Meeting ID : 845 2328 6949

Passcode : 553210

Kami lampirkan dokumen yang sudah terkumpul pada *link google drive*: <https://bit.ly/bbtnggpmeet> sebagai bahan pembahasan. Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan hadir tepat waktu.

Pt. Kepala Balai Besar,  
  
Wasis, S.H.  
NIP. 19650106 199803 1 004

**LAMPIRAN SURAT UNDANGAN**

Nomor : UN.1343 /BBTNGGP/TU.3/10/2021

Tanggal : 18 Oktober 2021

**DAFTAR UNDANGAN**

No	Nama	Penanggung Jawab
<b>I Tim Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Balai Besar TNGGP Tahun 2021</b>		
1	Kapala Balai Besar	Pengarah dan Pembina
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua Tim Kerja
3	Kepala Bidang Teknis Konservasi	Wakil Ketua Tim Kerja
4	Kapala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan	Sekretaris
5	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan	Anggota
6	Kepala Satuan Tugas POLHUT	Anggota
7	Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan BBTNGGP	Anggota
8	Koordinator Penyuluh Kehutanan BBTNGGP	Anggota
9	Andriyatno Sofiyudin, S.Hut. (PEH Pertama pada Sub Bagian Umum)	Anggota
10	Agus Deni (Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pada Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan)	Anggota
<b>II Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup BBTNGGP</b>		
11	Kepala Bidang PTN Wilayah I Cianjur	
12	Kepala Bidang PTN Wilayah II Sukabumi	
13	Kepala Bidang PTN Wilayah III Bogor	
14	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan	
15	Kepala Sub Bagian Program dan Kerja Sama	
16	Kepala Sub Bagian Umum	
17	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I	
18	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II	
19	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III	
20	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV	
21	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V	
22	Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI	

Plt. Kepala Balai Besar,



Wacfa, S.H.

NIP. 19650106 199803 1 004

**DAFTAR REKAP DOKUMEN BAHAN  
PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI**

No	Isu / Jenis dokumen	Check List		Penanggung Jawab
		Ada	Belum Ada	
1	<b>Status Hukum Kawasan Konservasi</b>			
a	SK Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Nomor: SK. 3683/Menhut-VII/KUH/2014	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
b	Peta Rekonstruksi tahun 2006, 2010, 2011, 2013, dan 2014	✓		
c	Peta Penetapan Kompleks Hutan Cagar Alam Gunung Gede dan Gunung Pangrango (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 472/Kpts-II/1992)	✓		
d	Peta Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangango di Provinsi Jawa Barat (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 174/Kpts-I/2003)	✓		
e	Peta Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 3683/Menhut-VII/KUH/2014)	✓		
2	<b>Peraturan kawasan konservasi</b>			
a	SK Dirjen KSDAE Nomor: SK. 356/KSDAE/SET.3/KSA.0/12/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
b	Peta Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Lampiran SK Dirjen KSDAE Nomor: SK. 356/KSDAE/SET.3/KSA.0/12/2016)	✓		
c	SK Dirjen KSDAE Nomor: SK. 245/KSDAE/SET/KSA.0/9/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		
d	Dokumen Revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		
3	<b>Penegakan Peraturan</b>			
a	Anggaran pengamanan hutan tahun 2021	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
b	Data SDM Pengamanan Hutan TNGGP Tahun 2021	✓		
c	Juknis Pengamanan Hutan Tahun 2015	✓		
d	SOP Penanganan Kasus Pengamanan Hutan		✓ (cover)	
e	SOP Penanganan Kebakaran Hutan Tahun 2015		✓ (cover)	

No	Isu / Jenis dokumen	Check List		Penanggung Jawab
		Ada	Belum Ada	
4	Tujuan utama dari kawasan konservasi			
a	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2019 - 2028	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
b	Rencana Strategis Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020 – 2024	✓		
c	Rencana Kerja Tahun 2021 Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango		✓	
5	Desain kawasan konservasi			
a	SK Dirjen KSDAE Nomor: SK. 245/KSDAE/SET/KSA.0/9/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
b	Dokumen Revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		
c	Peta Kerja Resort	✓		
6	Pengukuhan (demarkasi) batas kawasan konservasi			
a	Peta Rekonstruksi tahun 2006, 2010, 2011, 2013, dan 2014	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
b	Peta Penetapan Kompleks Hutan Cagar Alam Gunung Gede dan Gunung Pangrango (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 472/Kpts-II/1992)	✓		
c	Peta Penunjukan Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangango di Provinsi Jawa Barat (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: 174/Kpts-I/2003)	✓		
d	Peta Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor: SK. 3683/Menhut-VII/KUH/2014)	✓		
e	Peta Review Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangango (Lampiran SK Dirjen KSDAE Nomor: SK. 245/KSDAE/SET/KSA.0/9/2020)	✓		
7	Rencana pengelolaan (Rencana Pengelolaan Jangka Panjang/RPJPN)			
	Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2019 - 2028	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
8	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN)			
a	Renja Tahun 2010	✓		
b	Renja Tahun 2011	✓		

No	Isu / Jenis dokumen	Check List		Penanggung Jawab
		Ada	Belum Ada	
c	Renja Tahun 2012	✓		
d	Renja Tahun 2013	✓		
e	Renja Tahun 2014	✓		
f	Renja Tahun 2015	✓		
g	Renja Tahun 2016	✓		
h	Renja Tahun 2017	✓		
i	Renja Tahun 2018	✓		
j	Renja Tahun 2019	✓		
k	Renja Tahun 2020	✓		
l	Renja Tahun 2021		✓	
9	Inventarisasi sumberdaya			
a	Laporan Identifikasi dan Inventarisasi Kehati untuk Penyusunan Peta Sebaran Satwa Liar Tingkat Resort di Sarongge Tahun 2020	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
b	Data Owa Jawa di JGC Tahun 2016 – 2020 (Statistik 2020)	✓		
c	Data Perjumpaan Satwa Tahun 2021 (SIDAK)	✓		
d	Data Perjumpaan Flora Tahun 2021 (SIDAK)	✓		
e	Data Spesies Prioritas Tahun 2016 - 2020	✓		
f	Masterplan, Site Plan, dan DED Sunctuary Elang		✓	
g	Kajian dan Penentuan Species Prioritas untuk Pelestarian Pengelolaan dan Pemantauan Kehati pada Delapan Kawasan Konservasi di Hulu DAS Sungai Citarum Tahun 2013	✓		
h	Master Plan Konservasi Owa Jawa	✓ (file draft)		
i	Surat Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP Nomor: SK. 126/IV-II/BT-5/2015 tentang Revisi Site Monitoring dan Baseline Data Spesies Prioritas Utama Terancam Punah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		
j	Peta Site Monitoring dan Baseline Data Spesies Prioritas Utama Terancam Punah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		
10	Sistem perlindungan			
a	Rekap SIMAKSI tahun 2021	✓		Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
b	SK PKS KTH Kemitraan Konservasi	✓		Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama
11	Riset			
a	Bibliografi Hasil-hasil Penelitian Tahun 2016 sampai 2021	✓		Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
b	Link Hasil-hasil Penelitian yang dipublikasi pada Website TNGGP	✓		

No	Isu / Jenis dokumen	Check List		Penanggung Jawab
		Ada	Belum Ada	
c	Laporan Identifikasi Bioprospecting di Resort Cimungkid Tahun 2020	✓		
d	Barcode perizinan praktik dan magang pada website TNGGP	✓		
e	Informasi focus dan topik penelitian pada website TNGGP	✓		
f	E Library GePang pada Website TNGGP	✓		Kepala Sub Bagian Data, Pelaporan, Evaluasi, dan Kehumasan
<b>12</b>	<b>Pengelolaan sumberdaya</b>			
a	Kajian Pemulihan Ekosistem Tahun 2015	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
b	Rencana Pemulihan Ekosistem Tahun 2020 - 2024	✓		
c	Peta Rencana Pemulihan Ekosistem Tahun 2020 - 2024	✓		
<b>13</b>	<b>Jumlah pegawai</b>			
a	Daftar Urut Kepangkatan TNGGP Tahun 2021	✓		Kepala Sub Bagian Umum
b	Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan	✓		
c	Daftar PPNP Tahun 2021	✓		
<b>14</b>	<b>Pelatihan Pegawai</b>			
a	Daftar Pegawai TNGGP yang Mengikuti Diklat dan Seminar	✓		Kepala Sub Bagian Umum
<b>15</b>	<b>Anggaran saat ini</b>			
a	RKAKL Tahun 2021	✓		
b	Daftar Kerjasama dan MoU Tahun 2016 – 2020 (Statistik 2020)	✓		Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama
c	Daftar Kerjasama Luar Negeri dan Hibah Tahun 2016 – 2020 (Statistik 2020)	✓		
<b>16</b>	<b>Kepastian anggaran</b>			Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama
a	RKAKL Tahun 2021	✓		
b	Daftar Kerjasama dan MoU Tahun 2016 – 2020 (Statistik 2020)	✓		
c	Daftar Kerjasama Luar Negeri dan Hibah Tahun 2016 – 2020 (Statistik 2020)	✓		
<b>17</b>	<b>Pengelolaan anggaran</b>			Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama
a	RKAKL Tahun 2021	✓		
b	Daftar Kerjasama dan MoU Tahun 2016 – 2020 (Statistik 2020)	✓		
c	Daftar Kerjasama Luar Negeri dan Hibah Tahun 2016 – 2020 (Statistik 2020)	✓		
<b>18</b>	<b>Perlengkapan</b>			Kepala Sub Bagian Umum
a	Rekap RKBMN	✓		
b	Daftar Sarana Praasarana per 31 Desember 2020 (Statistik 2020)	✓		
c	Daftar Barang Persediaan per 31 Desember 2020 (Statistik 2020)	✓		

No	Isu / Jenis dokumen	Check List		Penanggung Jawab
		Ada	Belum Ada	
19	<b>Pemeliharaan perlengkapan</b>	✓		Kepala Sub Bagian Umum
a	Anggaran pemeliharaan perlengkapan pada RKAKL Tahun 2021	✓		Kepala Sub Bagian Umum
20	<b>Pendidikan dan penyadaran</b>	✓		Kepala Sub Bagian Data, Pelaporan, Evaluasi, dan Kehumasan
a	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bina Cinta Alam Tahun 2015	✓		Kepala Sub Bagian Data, Pelaporan, Evaluasi, dan Kehumasan
b	Perdes Kepala Desa Naggerang tentang Pemeliharaan Hutan dan Mata Air di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		Kepala Bidang PTN Wilayah III Bogor
21	<b>Perencanaan penggunaan lahan dan air</b>	✓		
a	SK Dirjen KSDAE Nomor: SK. 204/KSDAE/SET/KSA.3/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
b	SK Dirjen KSDAE Nomor: SK. 245/KSDAE/SET/KSA.0/9/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
c	Dokumen Revisi Zona Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		
d	Dokumen Kegiatan Cagar Biosfer Cibodas	✓		Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama
22	<b>Pemerintah dan swasta di sekitar (penggunaan lahan dan air)</b>	✓		
a	SK Dirjen KSDAE Nomor: SK. 204/KSDAE/SET/KSA.3/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
b	Peta Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi pada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Lampiran SK Dirjen KSDAE Nomor: SK. 204/KSDAE/SET/KSA.3/5/2018)	✓		
c	Pertimbangan Teknis IPA	✓		
d	Telaah RKT IPA	✓		
e	Rekap IPA, IUPA, dan IUPEA	✓		
f	SK IPA	✓		
23	<b>Masyarakat adat dan Masyarakat Asli/ tradisional</b>	✓		
	Tidak ada	✓		Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan

No	Isu / Jenis dokumen	Check List		Penanggung Jawab
		Ada	Belum Ada	
24	<b>Masyarakat lokal (kontribusi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan)</b>			
a	Masyarakat berkontribusi pada penyusunan Review Zonasi TNGGP melalui Konsultasi Publik yang dituangkan pada Berita Acara	✓		Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
b	Masyarakat tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (Berita Acara dan SK Pembentukan KTH)	✓		Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
c	Perdes Kepala Desa Naggerang tentang Pemeliharaan Hutan dan Mata Air di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	✓		Kepala Bidang PTN Wilayah III Bogor
25	<b>Keuntungan ekonomis</b>			
a	Laporan Identifikasi Potensi SDA dan Ekonomi Desa Penyangga TNGGP Tahun 2016	✓		Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
b	Laporan Evaluasi Monitoring KTH Kemitraan Konservasi Tahun 2019	✓		
c	Laporan Evaluasi Monitoring KTH Kemitraan Konservasi Tahun 2020	✓		
26	<b>Monitoring dan evaluasi</b>			
a	Laporan Kinerja BBTNGGP Tahun 2020	✓		Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan
b	Statistik Tahun 2020	✓		
c	Laporan Evaluasi Pegawai Tahun 2021	✓		
d	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bina Cinta Alam Tahun 2016	✓		
e	Laporan Evaluasi Perjanjian Kerjasama		✓	Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama
27	<b>Fasilitas pengunjung</b>			
a	Daftar Sarana Prasarana Pengunjung pada Rekap RKBMN	✓		Kepala Sub Bagian Umum
b	Daftar Sarana dan Prasarana Pengunjung pada Statistik 2020	✓		
28	<b>Operator wisata komersil</b>			
a	Master Plan Pengembangan Wisata (Situgunung, Manadalawangi, dan Gunung Putri)	✓		Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
b	Desain Tapak (Barubolang, LBC, Situgunung, Selabintana, Sarongge, Mandala Wangi, Gunung Putri, Curug Luhur, Cikaracek, Cikahuripan, Bodogol, Batulempar,	✓		
c	Tabel PNBP dari kunjungan wisata tahun 2020 dan tahun 2021	✓		
d	Daftar IUPSWA, IUPJWA, IUPA, IUPEA, IPA, dan IPEA	✓		
e	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi TNGGP (Statistik 2020)	✓		
f	Peta Resort Pengelolaan Wisata	✓		Kepala Seksi Perencanaan,

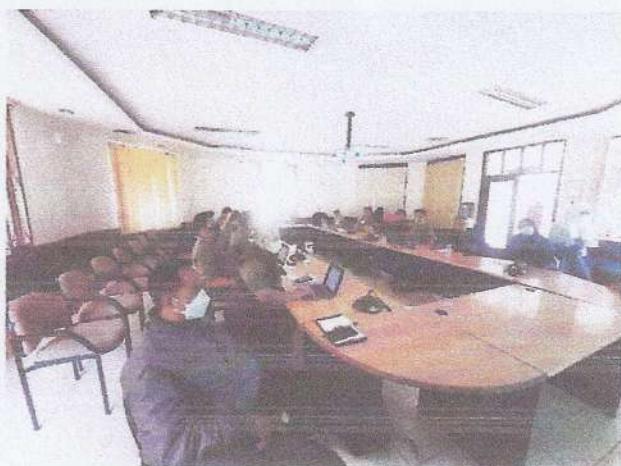
No	Isu / Jenis dokumen	Check List		Penanggung Jawab
		Ada	Belum Ada	
				Perlindungan dan Pengawetan
29	Pungutan (PNBP atau pungutan lain)			
a	SK Kepala Balai Besar Nomor: SK. 42/BBTNGGP/Tek.2/1/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Tiket Masuk Kegiatan Wisata di TNGGP	✓		Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
b	Daftar Penerimaan PNBP dari Kegiatan Wisata Tahun 2020 dan 2021 (SIDAK)	✓		
c	Daftar Penerimaan PNBP per Jenis Penerimaan Tahun 2021 (SIDAK)	✓		Kepala Sub Bagian Umum
d	Daftar Penerimaan PNBP per Jenis Penerimaan Tahun 2020 (Statistik 2020)	✓		
30	Kondisi nilai-nilai			
	Penilaian kondisi nilai-nilai didasarkan pada riset dan/ atau monitoring			Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan
a	Organisasi telah menerapkan sistem monitoring berdasarkan metodologi ilmiah (juknis monitoring satwa, aves, primata, dan mamalia terlampir)	✓		
	Program pengelolaan yang spesifik sedang dilakukan untuk menghadapi tekanan terhadap nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya			
b	Sudah ada kajian pemulihian ekosistem, Rencana Pemulihian Ekosistem (RPE), masterplan pengelolaan owa jawa, rencana tapak sanctuary elang jawa, dsb. (terlampir)	✓		
	Kegiatan untuk menjaga nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya kunci merupakan bagian yang rutin dalam pengelolaan Kawasan Konservasi			
c	Organisasi sudah memiliki data-data hasil monitoring nilai-nilai keanekaragaman hayati dan ekologis secara rutin	✓		

Timestamp	Nama	Jenis Kelamin	Lokasi Kerja
2021/10/19 9:21:59 AM GMT+7	Dadi HM.	Laki-Laki	Bidang PTN Wilayah II Sukabumi
2021/10/19 9:23:39 AM GMT+7	Darwin	Laki-Laki	Bidang PTN Wilayah I Cianjur
2021/10/19 9:25:15 AM GMT+7	Agus Deni	Laki-Laki	Kantor Balai Besar
2021/10/19 9:26:23 AM GMT+7	Aganto Seno	Laki-Laki	Kantor Balai Besar
2021/10/19 9:26:35 AM GMT+7	Poppy Oktadiyani	Perempuan	Kantor Balai Besar
2021/10/19 9:27:11 AM GMT+7	Buana Darmansyah	Laki-Laki	Kantor Balai Besar
2021/10/19 9:31:26 AM GMT+7	ADI SUPRIYONO, S.H	Laki-Laki	Kantor Balai Besar
2021/10/19 9:37:37 AM GMT+7	Andriyatno Sofiyudin	Laki-Laki	Kantor Balai Besar
2021/10/19 9:46:10 AM GMT+7	Irma Indriani	Perempuan	Bidang PTN Wilayah I Cianjur
2021/10/19 10:04:57 AM GMT+7	AMRU IKHWANSYAH	Laki-Laki	Bidang PTN Wilayah III Bogor
2021/10/19 12:13:28 PM GMT+7	Aden	Laki-Laki	Kantor Balai Besar

# DOKUMENTASI PERSIAPAN PENILAIAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2021

(Selasa, 19 Oktober 2021)

Meeting ID : 845 2326 6949  
Passcode : 553210



PERILAKU & EFektivitas PENGETAHUAN : Lembar Data 2			
Indikator	Kriteria	Skor Poin dan Angka persentase	Klasifikasi/Pengelompokan
1. Status Hukum Kerasan	Kerasan-kerasan di bawah persyaratan teknis Hukum	5	SG Pengadilan Negeri Dr. H. T. T. T. dan PT. Agung dan PT. Bina
	Adakah sifat-sifat teknis hukum kerasan berada pada sifat-sifat teknis yang dimungkinkan tetapi dalam	1	
Apakah hukum kerasan ini merupakan hukum	SATU		
	Adakah sifat-sifat teknis hukum kerasan berada pada sifat-sifat teknis yang dimungkinkan tetapi dalam	2	
2. Status Hukum	Kerasan-kerasan di bawah persyaratan teknis	3	
	Adakah sifat-sifat teknis hukum kerasan berada pada sifat-sifat teknis yang dimungkinkan tetapi dalam	2	
	Kerasan-kerasan di bawah persyaratan teknis	1	



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO  
NOMOR : SK. 18 /BBTNGGP/TU.3/08/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN  
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI  
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2021**

**KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, diperlukan adanya Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;

b. bahwa dalam mendukung kegiatan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung tentang Pembentukan Tim Penilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 -- 2024;

6. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.12/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi:

Memperhatikan : Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2019 - 2028

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Penilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran kolom 2 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU, sebagaimana lampiran kolom 3 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan.

**DITETAPKAN DI : CIBODAS  
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2021  
P/I. Kepala Balai Besar,**

**Wasia, S.H.  
NIP. 19650106 199803 1 004**



**Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:**

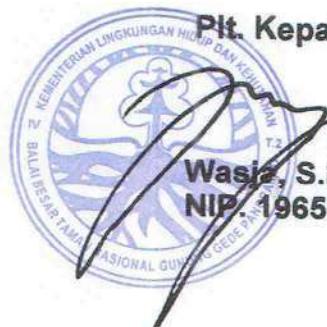
1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Jakarta;
2. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi;
3. Pejabat Eselon III Lingkup BBTNGGP;
4. Pejabat Eselon IV Lingkup BBTNGGP;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango  
Nomor : SK.98 /BBTNGGP/TU.3/08/2021  
Tanggal : 30 Agustus 2021

**SUSUNAN TIM PENILAIAN  
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI  
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO TAHUN 2021**

<b>Jabatan dalam Tim</b>	<b>Pejabat/ Nama</b>	<b>Tugas</b>
Pengarah dan Pembina	Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	Memberikan arahan pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021
Ketua Tim Kerja	Kepala Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memimpin dan mengelola tim kerja;</li><li>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021</li></ul>
Wakil Ketua Tim Kerja	Kepala Bidang Teknis Konservasi	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021</li><li>b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan Hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021</li></ul>
Sekretaris	Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengkoordinasikan bahan dan data dalam penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Balai Besar Taman Nasional</li></ul>

Jabatan dalam Tim	Pejabat/ Nama	Tugas
		Gunung Gede Pangrango Tahun 2021 b. Menyusun matrik hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021
Anggota	1. Aden Mahyar Burhanuddin, S.H., M.H. (Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan) 2. Adi Supriyono, S.H. (Polisi Kehutanan Muda dan Kepala Satuan Tugas Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango) 3. Boby Darmawan, S.Hut. (PEH Muda dan Koordinator Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango) 4. Poppy Oktadiyani, S.Hut. M.Si. (Peyuluhan Kehutanan Madya dan Koordinator Penyuluhan Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango) 5. Andriyatno Sofiyudin, S.Hut. (PEH Pertama dan Penata Adminsitrasi Kepegawaian) 6. Agus Deni (PEH Penyelia dan Pengolah Data Kehumasan)	Mengumpulkan dan mengkompilasi bahan dan data untuk kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2021



Plt. Kepala Balai Besar,

Wasiz, S.H.  
NIP. 19650106 199803 1 004



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**

Jalan Raya Cibodas PO BOX 3 Sdi Tip/Fax (0263) 512776/519413  
e-mail : [info@gedepangrango.org](mailto:info@gedepangrango.org) website : [www.gedepangrango.org](http://www.gedepangrango.org)

15 November 2021

Nomor : S.169 /BBTNGGP/TU.3/11/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi  
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Yth. Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi  
di  
Jakarta

Dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melaksanakan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui forum yang melibatkan para pihak (36 orang dari internal Balai Besar TNGGP dan 38 orang eksternal yang hadir) pada tanggal 12 November 2021 di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Cibodas, Cianjur secara *offline* dan *online* (*hybrid meeting*).
2. Berdasarkan resume hasil penilaian, nilai efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah 83,84.
3. Sebagai kelengkapan dokumen pelaporan, kami lampirkan:
  - a. Lembar Data 1 Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi;
  - b. Lembar Data 2 Ancaman Kawasan Konservasi;
  - c. Lembar Penilaian;
  - d. Resume Hasil Penilaian;
  - e. Rencana Aksi;
  - f. Surat Undangan Forum Penilaian;
  - g. Surat Tugas Fasilitator;
  - h. Dokumentasi pelaksanaan forum penilaian;
  - i. Dokumen pendukung lainnya dapat diakses pada link: <https://bit.ly/bbtnggpmeet>.

Kami sampaikan juga laporan dimaksud dalam format *softfile*, dan kami kirim ke alamat email: [ditkk@menlhk.go.id](mailto:ditkk@menlhk.go.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Balai Besar,

Wasia, S.H.

NIP. 196501061998031004

Tembusan:  
Direktur Jenderal KSDAE





# SERTIFIKAT

SFT.1972/BBTNGGP/TU.3/11/2021

DIBERIKAN KEPADA:

*Mumuh M. Rozi*

Atas partisipasinya sebagai Peserta

Kegiatan Penilaian Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango  
Tahun 2021

Cibodas, 12 November 2021

Plt. Kepala Balai Besar,



Wasja, S.H

NIP. 19650106 199803 1 004